



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 3 April 2024

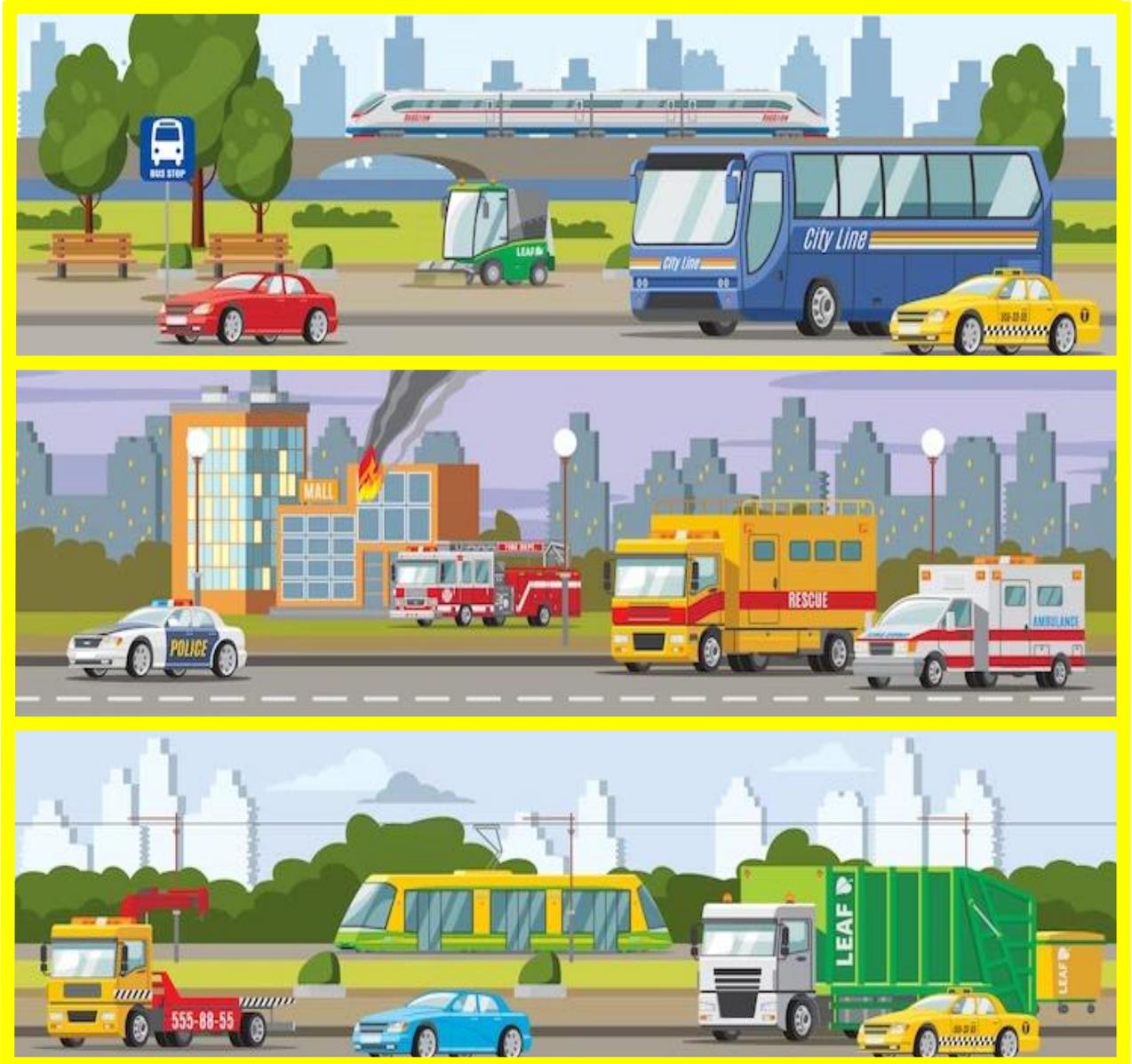
Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA
BARAT**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu institusi karena pada LKjIP dilaporkan capaian indikator kinerja tahun 2023 yang mencakup aspek pendukung yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya good governance dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, diharapkan sebagai upaya dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dalam penyusunan LKjIP tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang positif dan kritik yang konstruktif guna mengembangkan kinerja peneliti sehingga LKjIP tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan ide / gagasan dalam menyusun LKjIP ini.

KEPALA


DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721222 199403 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 5 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

- 1) Jumlah Trayek Yang Diakses
- 2) Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
- 3) V/C Rasio di jalan Provinsi
- 4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
- 5) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata – rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2023 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.18.377.116.366 pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp.18.145.928.976 (98,74%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 9.442.433.675, terealisasi sebesar Rp.9.388.291.205 (99,43%).
- Belanja Penunjang Urusan dengan anggaran sebesar Rp.3.700.414.411, terealisasi sebesar Rp.3.647.272.500 (98,56 %).
- Belanja urusan sebesar Rp.5.234.268.280, terealisasi sebesar Rp.5.110.365.271 (97,63 %)



Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 10 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Pengolahan Data Retribusi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.273.600, realisasi sebesar Rp.11.075.645 (57,47%). Sisa anggaran Rp. 8.197.955 merupakan sisa belanja lembur serta sisa belanja perjalanan dinas dan BBM

2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 76.715.240, realisasi sebesar Rp. 59.813.360 (77,97%). Sisa anggaran Rp. 16.901.880 merupakan sisa belanja makan minum serta sisa belanja lembur dan perjalanan dinas

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.850.500, terealisasi sebesar Rp.19.397.898 (88,78 %). Sisa anggaran sebesar Rp.2.452.602 merupakan efisiensi dari belanja perjalanan dinas dan BBM

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.238.800, realisasi sebesar Rp.20.528.500 (88,34 %) dan sisa anggaran sebesar Rp.2.710.300 yang merupakan efisiensi dari belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor

5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.436.000, terealisasi sebesar Rp.13.367.357 (86,60%), dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.068.643 yang merupakan efisiensi belanja BBM

6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.92.904.312, terealisasi sebesar Rp.80.703.601 (86,87%), dengan sisa anggaran sebesar Rp.12.200.711 yang merupakan efisiensi belanja Perjalanan dinas dan BBM

7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.120.600, terealisasi sebesar Rp.49.457.294 (86,58%), dengan sisa anggaran sebesar Rp.7.663.306 yang merupakan sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat



8. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.025.300, realisasi sebesar Rp.3.352.000 (66,70%). Sisa anggaran Rp. 1.673.000 Merupakan efisiensi anggaran berupa belanja barang pakai habis (cetak, makan minum rapat)

9. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.71.833.150, terealisasi sebesar Rp.63.540.554 (88,46%). Sisa anggaran sebesar Rp.8.292.596 merupakan sisa anggaran perjalanan dinas dan BBM.

10. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.483.300, realisasi sebesar Rp.52.644.000 (85,62%) dan sisa anggaran sebesar Rp.8.839.300 yang merupakan sisa anggaran perjalanan dinas dan BBM serta belanja cetak

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun masih perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan Kinerja Dinas yaitu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Gambaran Organisasi.....	1
A.1.Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
A.2.Tugas pokok dan fungsi.....	2
A.3.Struktur Organisasi.....	3
A.4.Sumber daya Manusia.....	5
B.Aspek Strategis Organisasi.....	7
C.Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A.Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
B.Hasil Pengukuran Kinerja	20
C.Capain Kinerja Organisasi	21
C.1 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Konektivitas).....	21
C.1.1. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi).....	41
C.1.1.1.Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....	42
1.Indikator Kinerja Jumlah Trayek yang diakses.....	42
a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	49
b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	49
c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	50
d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	51
e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	52
2.Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum.....	59
a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	59
b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	60

c)	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	61
d)	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	62
e)	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	64
C.1.2.	Perbandingan Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi) dengan Standar Nasional (Kementrian Perhubungan).....	71
C.2	Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas).....	74
C.2.1.	Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi).....	77
C.2.1.1.	Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.....	77
1.	Indikator Kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi	77
a)	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	78
b)	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	82
c)	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	83
d)	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	84
e)	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	85
C.2.2.	Perbandingan Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi) dengan Standar Nasional (Kementrian Perhubungan).....	92
C.3	Indikator Kinerja Tujuan (Nilai Akuntabilitas Kinerja)	93
C.3.1.	Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi).....	93
C.3.1.1.	Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.....	93
1.	Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	93
a)	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	94
b)	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	94
c)	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	95
d)	Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	96



e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	97
C.4. Indikator Kinerja Tujuan (Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi).....	99
C.4.1. Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi).....	99
C.4.1.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.....	99
1. Indikator Kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	99
a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	103
b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	113
c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	114
d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	115
e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	116
C.4.2. Perbandingan Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi) dengan Standar Nasional (Kementrian Perhubungan).....	118
D. Realisasi Anggaran.....	119
BAB IV PENUTUP	131
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel I. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon	5
Tabel I. 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel I. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel I. 5	Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026	8
Tabel II. 1	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat....	12
Tabel II. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	13
Tabel II. 3	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	15
Tabel II. 4	Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel II. 5	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023	17
Tabel II. 6	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2023.....	18
Tabel III. 1	Skala pengukuran capaian sasaran kinerja perangkat daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).....	19
Tabel III. 2	Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023	20
Tabel III. 3	Tabel Jumlah trayek yang dibutuhkan dan trayek yang dilayani	22
Tabel III. 4	Lintasan angkutan penyeberangan di Sumatera Barat	40
Tabel III. 5	Target dan realisasi Rasio Konektivitas	40
Tabel III. 6	Tabel sasaran strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi)	41
Tabel III. 7	Target dan realisasi sasaran strategis 1	42
Tabel III. 8	Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023;.....	43
Tabel III. 9	Realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di provinsi sumatera barat	44
Tabel III. 10	Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2023	46
Tabel III. 11	Lintasan kapal penyeberangan Sumatera Barat	47
Tabel III. 12	Jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2023	48
Tabel III. 13	Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses Tahun 2023.....	49
Tabel III. 14	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya.....	49
Tabel III. 15	Target Jumlah Trayek yang di Akses berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 - 2026	50
Tabel III. 16	Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses .	51
Tabel III. 17	Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses	52
Tabel III. 18	Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses	54
Tabel III. 19	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	59
Tabel III. 20	Data Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum 2023	60
Tabel III. 21	Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021, 2022, dan 2023	60
Tabel III. 22	Target Jumlah penumpang terangkut angkutan umum 2021 - 2026	61
Tabel III. 23	Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum	62

Tabel III. 24	Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	64
Tabel III. 25	Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum	66
Tabel III. 26	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan.....	73
Tabel III. 27	Target dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas	75
Tabel III. 28	Tabel sasaran strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi)	76
Tabel III. 29	Target dan realisasi sasaran strategis 2	77
Tabel III. 30	Penetapan Ruas Jalan Provinsi Yang Dilakukan Perhitungan Terkait Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023.....	79
Tabel III. 31	Realisasi kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi di provinsi sumatera barat tahun 2023.....	80
Tabel III. 32	Perbandingan V/C Rasio tahun 2021, 2022, dan 2023	82
Tabel III. 33	Target V/C rasio dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026.....	83
Tabel III. 34	Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi...	84
Tabel III. 35	Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi.....	85
Tabel III. 36	Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi.....	87
Tabel III. 37	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan.....	92
Tabel III. 38	Target dan realisasi sasaran strategis 3	93
Tabel III. 39	Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 - 2023	94
Tabel III. 40	Target Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dalam Renstra Dinas Perhubungan.....	95
Tabel III. 41	Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	96
Tabel III. 42	Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.....	97
Tabel III. 43	Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.....	98
Tabel III. 44	Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran.....	99
Tabel III. 45	Target dan realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2023	103
Tabel III. 46	Nilai IKM pertanyaan ke-1.....	106
Tabel III. 47	Nilai IKM pertanyaan ke-2.....	106
Tabel III. 48	Nilai IKM pertanyaan ke-3.....	107
Tabel III. 49	Nilai IKM pertanyaan ke-4.....	108
Tabel III. 50	Nilai IKM pertanyaan ke-5.....	108
Tabel III. 51	Nilai IKM pertanyaan ke-6.....	109
Tabel III. 52	Nilai IKM pertanyaan ke-7.....	110
Tabel III. 53	Nilai IKM pertanyaan ke-8.....	110
Tabel III. 54	Nilai IKM pertanyaan ke-9.....	111
Tabel III. 55	Nilai IKM pertanyaan ke-10.....	112



Tabel III. 56	Hasil survei ke masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	112
Tabel III. 57	Tabel Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan sebelumnya.....	113
Tabel III. 58	Target kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	114
Tabel III. 59	Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	115
Tabel III. 60	Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.....	116
Tabel III. 61	Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.....	117
Tabel III. 62	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan.....	118
Tabel III. 63	Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.	119
Tabel III. 64	Realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan Program	119
Tabel III. 65	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses	120
Tabel III. 66	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	121
Tabel III. 67	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi	122
Tabel III. 68	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.....	123
Tabel III. 69	Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.....	123
Tabel III. 70	Realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2023:	124
Tabel IV. 1	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023.....	132

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

A.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 (Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat)
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 (Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat)
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 (Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat)

Dimana pada Peraturan Gubernur tersebut dapat diperoleh beberapa informasi antara lain:

- a. Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
- b. Peraturan daerah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe (A, B, C)
- c. Menimbang beberapa hal terkait pelaksanaan penataan perangkat daerah, maka sudah dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut.
- d. Untuk Dinas Perhubungan tidak ada perubahan, dimana Dinas Perhubungan masih perangkat daerah dengan tipe B, yang menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang perhubungan



Untuk pembentukan UPTD di Dinas Perhubungan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kemudian sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1972/OTDA tanggal 29 Maret 2019 perihal Rekomendasi Perubahan Kelas Pada UPTD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan, yaitu UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas 2 (dua) UPTD kelas A yaitu :

- a. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I; dan
- b. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

A.2. Tugas pokok dan fungsi

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Peraturan ini menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan Dinas pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas perhubungan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
2. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



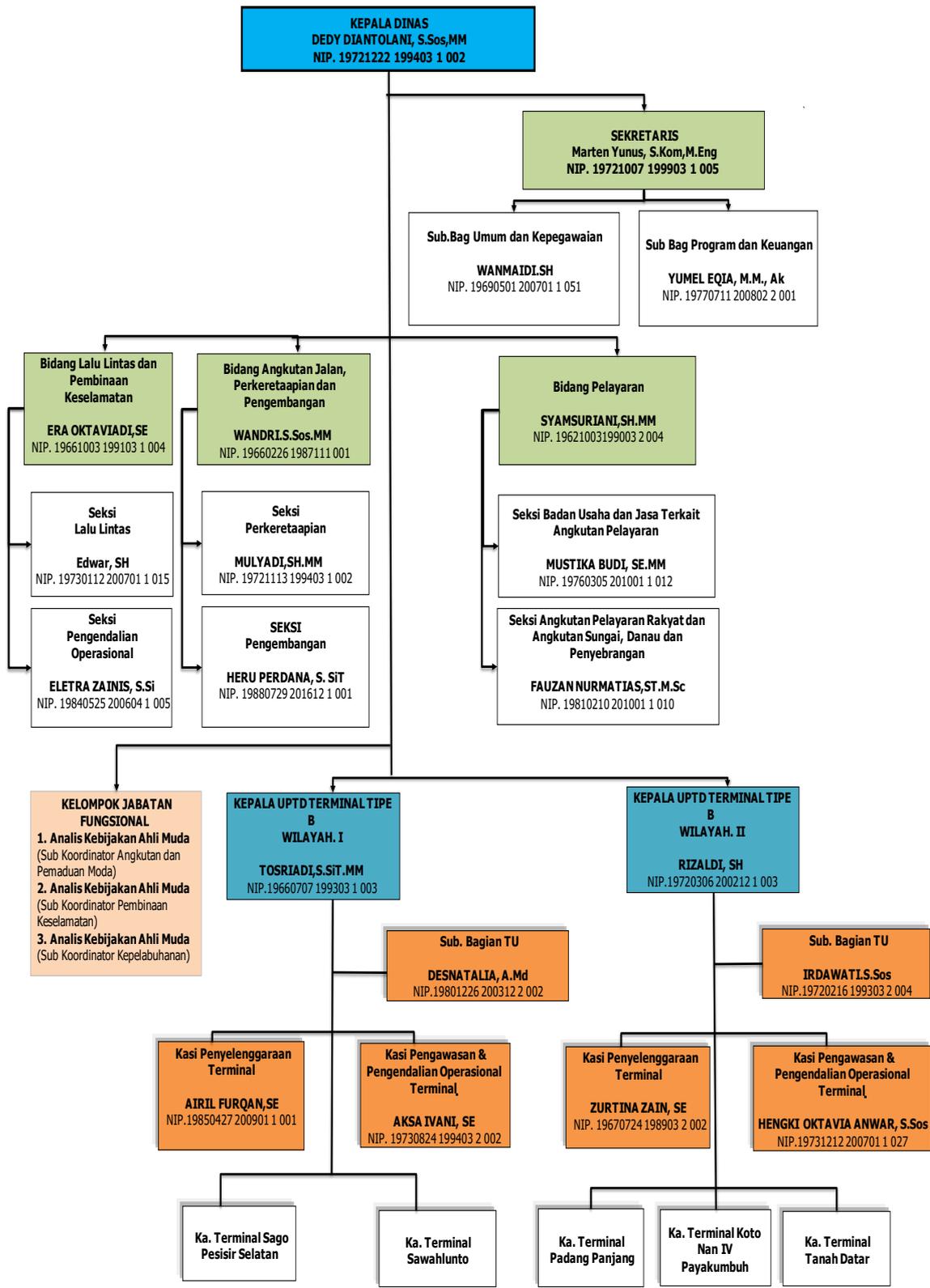
A.3. Struktur Organisasi

Dasar:

1. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 20 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan hal diatas, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**



A.4. Sumber daya Manusia

Jumlah Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Kondisi Desember 2023 adalah sebanyak 82 Orang, berikut rinciannya:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	BERDASARKAN GOLONGAN	JUMLAH
1	GOL I	-
2	GOL II	26
3	GOL III	44
4	GOL IV	12
	TOTAL	82

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon

NO	BERDASARKAN ESSELON	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	6
3	ESELON IV	14
4	STAF	61
	TOTAL	82

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.2	10
2	S.1/D.4	29
3	D.3	12
4	D.2/D.1/SLTA	31
5	SLTP/SD	-
	TOTAL	82

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BERDASARKAN JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	62
2	PEREMPUAN	20
	TOTAL	82

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Terkait pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan kerja sama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimulai sejak tahun 2014 tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor 384/VI/HK201/STTD-2014 dan nomor 120-4/GSD/2014. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan lagi perpanjangan selama 5 tahun tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor HK.201/6/14/STTD-2019 dan nomor 120-030-PKS/GSB-2019. Dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 sudah bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

Hasil dari MoU tersebut, hingga saat ini kebutuhan pelaksanaan yang sifatnya teknis sudah dapat diisi oleh lulusan STTD. Namun disisi lain tenaga pelaksana yang bersifat administratif masih sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas (kompetensi). Hal ini disebabkan oleh:

- a) Lemahnya pengelolaan dalam hal analisa jabatan dan analisis beban kerja yang menyebabkan komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional.
- b) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
- c) Belum maksimalnya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis kinerja.
- d) Kurangnya diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana sesuai dengan jabatannya.
- e) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.

Sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan yaitu berupa fasilitas yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Sarana dan prasarana utama di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat antara lain terdiri dari satu gedung utama yang mempunyai 2 lantai yang didalamnya terdapat beberapa ruangan seperti ruangan Kepala Dinas, ruangan



Sekretaris, serta 7 ruangan untuk masing – masing bidang atau sub bagian yang ada di kantor Dinas Perhubungan, pada gedung utama tersebut juga memiliki 3 aula, serta memiliki toilet di masing – masing lantainya. Kemudian untuk gedung lain di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu antara lain memiliki 1 bangunan mushola, 1 kantin, 1 gedung gudang, serta 1 gedung tambahan khusus bidang Lalu lintas yaitu gedung seksi Pengendalian Operasional. Kemudian untuk membantu dalam pengamanan pada pintu masuk dan keluar kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki pos satpam. Untuk kondisi gedung yang terdapat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, semua gedungnya masih layak digunakan, namun masih perlu dilakukannya pemeliharaan setiap tahunnya.

Sarana dan prasarana tambahan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, untuk fasilitas tambahan dalam bidang teknologi informasi antara lain sudah dilengkapi dengan beberapa komputer di masing – masing bidang serta memiliki jaringan internet yang lumayan bagus. Kemudian untuk sarana penunjang untuk bagian transportasi Dinas Perhubungan juga memiliki beberapa kendaraan dinas, kendaraan dinas bagian pengendalian operasional, bus sedang, serta satu mobil derek. Untuk keadaan semua kendaraan dinasnya masih bagus dan masih bisa membantu operasional pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

B. Aspek Strategis Organisasi

Peraturan Gubernur (pergub) Sumatera Barat No. 03 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a) Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b) Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c) Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan.
- d) Masih Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat diperoleh melalui analisis Renstra Kementerian Perhubungan dan Analisis telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Tabel I. 5 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
1	Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah	1. Perlunya penguatan terhadap regulasi terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia 2. Dukungan dari stakeholder yang terkait unsur Perhubungan	Dalam menekan tingginya pelanggaran Over Dimensi Over Loading yang sangat berdampak kepada keselamatan pengguna jalan harus dilaksanakannya penegakan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan
2	Belum optimalnya pelabuhan Penyeberangan yang ada untuk melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (konektivitas antar pulau)	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antar pulau	1. Pengembangan angkutan penyeberangan di Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi bagian dari cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010 – 2030 2. Perlunya penguatan terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (memantapkan lintas penyeberangan antar negara, pelabuhan angkutan penyeberangan serta pengembangan dermaga penyeberangan)
3	Masih ada wilayah kepulauan dan pesisir yang belum terpenuhi prasarana, sarana dan layanan transportasi yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	1. Pelimpahan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2. Kewenangan daerah Provinsi untuk	Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan (pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional seperti pelabuhan Tua Pejat (Kep. Mentawai), pelabuhan Siuban (Kep. Mentawai), pelabuhan Muara Siberut (Kep. Mentawai), pelabuhan Muaro

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
			mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Padang (Padang), pelabuhan pengumpan lokal) dan alur pelayaran (dikembangkannya disepanjang perairan laut dalam)
4	Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan di berbagai moda transportasi	Belum seimbang antara kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kajian terhadap kebutuhan pelayanan transportasi 2. Penguatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan (trans sumatera, pembangunan jaringan jalan bebas hambatan), jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (terminal penumpang tipe B di lima Kabupaten/Kota
5	Penurunan Level of Service (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi	Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 2. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan 3. Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi 	Pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan Level Of Service (LOS) jalan
6	Belum optimalnya moda alternatif angkutan barang untuk mengurangi beban jalan (transportasi jalan rel (kereta api) di Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan Trans Sumatera Railways System	Tingginya Pergerakan Angkutan Barang dibandingkan Angkutan Orang di Provinsi Sumatera Barat	Sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan kereta api (rencana pengembangan jalur utama, jalur lokal dan pengembangan prasarana serta sarana kereta api antar kota)



No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
7	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	Masih rendahnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis perhubungan	1.Kewenangan pengelolaan terminal tipe B dan pelabuhan pengumpan regional memerlukan SDM yang berkompeten 2.Kewenangan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan memerlukan tenaga SDM penegak hukum bidang perhubungan (PPNS)	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal

Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan, mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan.

Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kemudian berdasarkan hasil analisis tim penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat maka ditetapkanlah Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Mengupayakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, baik yang terjadi di Jalan Raya dan Perlintasan sebidang.
2. Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B.
3. Penanganan terpadu kawasan yang masuk dalam KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)
4. Mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan perintis melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Sumatera, dan mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain Selat Malaka.
5. Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).
6. Mendorong reaktivasi dan konektivitas jalur kereta api Sumatera Barat dan Riau

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2023. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut adalah dengan menetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana untuk Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Misi 6.

Tabel II. 1 Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Daerah		
Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Merata IK: Indeks Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	Rasio Konektivitas

Sumber data : RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Strategi dan Kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung dan mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam misi ke-6, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang berdasarkan renstra 2021 – 2026 adalah dengan menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6: "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermodal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil 2. Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan 3. Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
		Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem perijinan transportasi 2. Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B 3. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan
		Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan Angkutan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi 2. Penyusunan regulasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan transportasi sesuai dengan kewenangan 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
		Peningkatan dan pengembangan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 2. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan

Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6: "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		keselamatan transportasi	3. Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan 4. Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas

Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut. Dimana Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan Kinerja Layanan Transportasi dengan indikator Indeks Kinerja Layanan Transportasi yang juga dapat menunjang pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Organisasi	Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas
Terwujudnya keselamatan Transportasi	Rasio angka Kecelakaan lalu lintas
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 4 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	Trayek	6	6	6	6	6	6
		Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	Orang	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
2	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	Rasio	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB 70,00	BB 71,00	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	%	78%	79%	80%	81%	82%	83%

Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah rencana pencapaian target yang menjadi sasaran bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Perhubungan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN : 2023

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	20.000 .000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,30 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	4.389.554.955	APBD
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2.256.310.225	APBD
3	Program pengelolaan pelayaran	246.290.211	APBD
4	Program pengelolaan perkeretaapian	151.422.500	APBD
Jumlah		7.043.577.891	APBD

Setelah Anggaran 2023 dilaksanakan Dinas Perhubungan Sumatera Barat melakukan perubahan meliputi perubahan target dan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah anggaran perubahan, dimana terjadi perubahan pagu dana Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk efektifitas dalam kebutuhan pelaksanaan realisasi keuangan.

Perubahan yang dilakukan dalam rencana pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yaitu:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2023

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	18.500.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,30 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	4.500.115.251	APBD
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	4.125.953.929	APBD
3	Program pengelolaan pelayaran	199.290.211	APBD
4	Program pengelolaan perkeretaapian	109.323.300	APBD
Jumlah		8.934.682.691	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai informasi tambahan metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan. Berikut ini skala pengukuran capaian sasaran kinerja yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 1 Skala pengukuran capaian sasaran kinerja perangkat daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Kemudian untuk perhitungan persentase (%) capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

(Jika Realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik)

b. $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

(Jika Realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik)

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan perhitungan tingkat efisiensi (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017)

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100 \%$$

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Dari 4 Sasaran Strategis ditetapkan 5 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Trayek Yang Diakses
2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
3. V/C Rasio di jalan Provinsi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
5. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 %
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	18.500.000 orang	18.906.971 orang	102,19 %
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,50	0,45	110 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,30 BB	66,99 B	92,66 %
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	81,1%	101,37 %
Rata – rata Capaian					101,24 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah bagus. Dari 5 (lima) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

C. Capain Kinerja Organisasi

C.1 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Konektivitas)

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas.

Rasio Konektivitas merupakan persentase wilayah Sumatera Barat yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut.

Berikut merupakan formulasinya:

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas Provinsi:

= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1. IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut).
2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Note:

- Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30 (sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)
- Untuk bobot trayek atau lintas berdasarkan jumlah perjalanan angkutan (frekuensi), yaitu:
 - a) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
 - b) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
 - c) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5

Berikut ini hasil penghitungan rasio konektivitas pada tahun 2023:

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}} \\
 &= \frac{136 \times 1}{183} \\
 &= 0,743
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Untuk angka 136 merupakan lintasan trayek yang saat ini dilalui oleh operator angkutan dari jumlah kebutuhan trayek yaitu 183 trayek, berikut ini data lintasan trayek serta nama perusahaan yang melayaninya pada kondisi akhir tahun 2023: Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Provinsi Sumatera Barat 2023

Tabel III. 3 Tabel Jumlah trayek yang dibutuhkan dan trayek yang dilayani

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
1	1	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi	Pt. Yudha Transport Ekspres
			Pt. Ricky Rajo Transport
			Pt. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
2	2	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh	Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			Pt. Bahagia Family Express
			Pt. Son Tania Transport
3	3	Padang - Lubuk Selasih - Solok	Pt. Trans Mitra Ibu
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Danau Raya Ibu
			Pt. Dirgantara Kencana Mulia
4	4	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Sawahlunto	Pt. Indra Trans Gemilang
			Pt. Jasa Malindo Ibu
			Pt. Dirgantara Kencana Mulia

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
5	-	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Sawahlunto	-
6	-	Padang - Lubuk Alung	-
7	5	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Sei. Limau	Pt. Tranex Graha Perkasa Mandiri
8	6	Padang - Lubuk Alung - Sicincin - Sei. Sarik - Pd. Sago - Balepoh	Pt. Melsy Anugrah Transport
9	7	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Sei. Limau - Sei. Geringging	Pt. Alisma Alizar Asmanelly
			Pt. Tranex Graha Perkasa Mandiri
10	8	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Lubuk Basung	Pt. Alisma Alizar Asmanelly
			Pt. Dagang Pesisir Jaya
			Pt. Lubuk Basung Express
			Pt. Harmonis Ceria Wisata
			Pt. Bintang Lubuk Basung
11	9	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Lubuk Basung - Maninjau	Pt. Harmonis Trans Mandiri
			Pt. Dagang Pesisir Jaya
			Pt. Harmonis Ceria Wisata
			Pt. Harmoni Lubuk Basung
12	10	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Matur - Koto Alam	Pt. Bintang Lubuk Basung
			Pt. Bintang Rosa Transport
			Pt. Tranex Graha Perkasa Mandiri
13	11	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping	Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Famili Ceria Group
14	12	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping - Panti	Pt. Famili Ceria Group
15	13	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping - Panti - Rao	Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Khatulistiwa Bonjo Pusako
			Pt. Duta Pasaman Express

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
16	14	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Talu - Panti	Pt. Famili Ceria Group
17	15	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban	Pt. Tintin Transport Sukra
			Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Bahagia Family Express
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Son Tania Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
			Pt. Rns Transport Suliki
18	16	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki	Pt. Tintin Transport Sukra
			Pt. Bahagia Family Express
			Pt. Talago Jaya Prima
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
19	17	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	Pt. Tintin Transport Sukra
			Pt. Bahagia Family Express
			Pt. Talago Jaya Prima
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Son Tania Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
20	18	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Lubuk Bangku - Pkl.Kotobaru	Pt. Tintin Transport Sukra
			Pt. Yudha Transport Ekspres
			Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
21	19	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Kotobaru - Gn. Malintang - Muara Peti	Pt. Ricky Rajo Transport
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
22	20	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Mahat	Pt. Tintin Transport Sukra
			Pt. Talago Jaya Prima
			Pt. Son Tania Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
23	21	Padang - Padang Panjang - Batusangkar	Pt. Yanti Citra Pelangi
			Pt. Permata Ananda Transport
			Pt. Batusangkar Indah Transport
24	22	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Sungayang	Pt. Permata Ananda Transport
			Pt. Batusangkar Indah Transport
25	23	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Tabek Patah	Pt. Permata Ananda Transport
			Pt. Batusangkar Indah Transport
26	24	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Pd. Ganting	Pt. Batusangkar Indah Transport
27	25	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Balai Tengah	Pt. Doris Abadi Transport
			Pt. Mata Air Lintau
			Pt. Multi Karya Setangkai
28	26	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban - Balai Tengah	Pt. Sarah Nursyifa Transport
			Pt. Harapan Mama Transport
29	-	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Ampalu - Sitangkai - Balai Tengah	-
30	27	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Malalo	Pt. Tanjung Jaya Mutiara
31	28	Padang - Padang Panjang - Malalo	Pt. Carano Minang Transpor
			Pt. Tanjung Jaya Mutiara
32	29	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang	Pt. Telaga Indah Group
			Pt. Tri Saudara Ekspres
33	-	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Balik - Sulit Air	-
34	30	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Sijunjung	Pt. Indra Trans Gemilang
			Pt. Jasa Malindo Ibu
35	31	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao	Pt. Tampalo Prima Group

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
36	32	Padang - Pasar Baru - Painan	Pt. Harun Panduko Sati (Hps)
37	-	Padang - Pasar Baru - Koto Ranah	-
38	-	Padang - Pasar Baru - Painan - Batang Kapas	-
39	33	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang	Pt. Harun Panduko Sati (Hps)
40	-	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Balai Selasa	-
41	-	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Air Haji	-
42	34	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura	Pt. Harun Panduko Sati (Hps)
43	35	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura - Tapan	Pt. Harun Panduko Sati (Hps)
44	36	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura - Tapan - Silaut	Pt. Famili Ceria Group
45	37	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman	Pt. Alisma Alizar Asmanelly
46	-	Padang - Lubuk Alung - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	-
47	-	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat	-
48	38	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Sasak	Pt. Alisma Alizar Asmanelly
			Pt. Mandala Putra Mandiri
			Pt. Bintang Pasaman Express
			Pt. Armada Gading Sejati
49	39	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Talu	Pt. Alisma Alizar Asmanelly
			Pt. Alisma Jaya Mandiri
			Pt. Mandala Putra Mandiri
			Pt. Bintang Pasaman Express
50	40	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp.	Pt. Alisma Alizar Asmanelly

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Empat - Uj. Gading	
51	41	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	Pt. Mandala Putra Mandiri
			Pt. Bintang Pasaman Express
			Pt. Armada Gading Sejati
52	42	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Desa Baru	Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Mandala Putra Mandiri
			Pt. Armada Gading Sejati
53	43	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh	Pt. Usaha Murni Pratama
54	44	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh - Pd. Aro	Pt. Telaga Indah Group
			Pt. Usaha Murni Pratama
55	-	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh - Liki - Leter W	-
56	-	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Sp. Sikabau - Sp. Kotobaru - Ampalu	-
57	45	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao - Kotobaru - Sei. Rumbai	Pt. Indra Trans Gemilang
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Jasa Malindo Ibu
			Pt. Tampalo Prima Group
58	46	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao - Kotobaru - Abaisiat - Sitiung Iv	Pt. Tampalo Prima Group
59	-	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Tanah Bedantung - Kiliranjao - Sei. Rumbai - .Kt. Besar	-
60	-	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Sitiung -	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Timpeh	
61	47	Bukittinggi - Piladang - Payakumbuh	Pt. Pelita Arruya Mandiri Utama Pt. Tintin Transport Sukra Pt. Yudha Transport Ekspres Pt. Bintang Terang Binter Galuang
62	48	Bukittinggi - Padang Panjang	Pt. Pelita Indah Travel Pt. Pelita Arruya Mandiri Utama Pt. Karya Abadi Jaya Utama Kop. Angkutan Sakato Pt. Ransam Indah Transport Pt. Silvia Indah Mandiri
63	49	Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok	Pt. Carano Minang Transpor Pt. Tanjung Jaya Mutiara Pt. Jasa Malindo Ibu Pt. Tri Saudara Ekspres Pt. Binuang Express Group
64	50	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Ombilin - Solok	Pt. Silvia Indah Mandiri
65	51	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Pd. Ganting - Sawahlunto	Pt. Permata Bunda Transport Pt. Grand Son Indah
66	52	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto	Pt. Silvia Indah Mandiri Pt. Tanjung Jaya Mutiara
67	53	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman - Sei. Limau	Pt. Melsy Anugrah Transport
68	54	Bukittinggi - Sp. Koto Tuo - Malalak	Pt. Pelita Indah Travel Pt. Bintang Terang Binter Galuang
69	55	Bukittinggi - Matur - Lawang	Pt. Pelita Indah Travel Pt. Setia Satria Jaya Pt. Teratai Satria Jaya
70	56	Bukittinggi - Matur - Palembang	Pt. Bintang Rosa Transport Pt. Setia Satria Jaya Pt. Teratai Satria Jaya

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
			Pt. Setia Utama Mandiri
71	57	Bukittinggi - Matur - Palembang - Koto Alam	Pt. Bintang Rosa Transport
			Pt. Setia Satria Jaya
			Pt. Teratai Satria Jaya
			Pt. Setia Utama Mandiri
72	58	Bukittinggi - Matur - Maninjau	Pt. Setia Utama Mandiri
			Pt. Harmonis Ceria Wisata
73	59	Bukittinggi - Matur - Maninjau - Lubuk Basung	Pt. Setia Budi Wisata
			Pt. Setia Satria Jaya
			Pt. Harmonis Ceria Wisata
			Pt. Harmoni Lubuk Basung
74	60	Bukittinggi - Baso - Padang Tarok	Pt. Pelita Indah Travel
			Pt. Pelita Arruya Mandiri Utama
75	61	Bukittinggi - Simp.Tigo Baleh - Kubang Putih - Sei. Pua - Kapalo Koto - Badorai	Pt. Bintang Terang Binter Galuang
			Pt. Penampung Jaya Lemersing
76	62	Bukittinggi - Tj. Alam - Sp. Biaro - Lasi - Pasanehan	Pt. Fajar Kalimatang Jaya
			Pt. Merapi Ceria Mandiri
77	63	Bukittinggi - Pincuran - Sp. Tabik - Durian - Sei. Dareh (Tilatang Kamang)	Pt. Putra Salam Prima
			Pt. Kamang Jaya Agam
78	64	Bukittinggi - Tj. Alam - Sp. Sikabau - Bukik Kulirik - Sp. Pintu Koto - Bt. Baragung	Pt. Putra Salam Prima
			Pt. Kamang Jaya Agam
79	65	Bukittinggi - Pakan Kamih - Koto Panjang - Pakan Sinayan - Tarusan	Pt. Putra Salam Prima
			Pt. Kamang Jaya Agam
80	-	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping	-
81	66	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti	Pt. Famili Ceria Group
82	67	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk	Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Khatulistiwa Bonjo Pusako

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Sikaping - Panti - Rao	Pt. Duta Pasaman Express
83	68	Bukittinggi - Baso - Sp. Batu Hampar - Suayan	Pt. Pelita Indah Travel
84	69	Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban	Pt. Putra Agung Sepakat
85	70	Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki	Pt. Putra Agung Sepakat
86	71	Bukittinggi - Payakumbuh - Koto Tinggi	Pt. Putra Agung Sepakat
87	72	Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Koto Baru	Pt. Bintang Terang Binter Galuang
88	73	Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Ma. Peti	Pt. Kapur Indah Abadi
89	74	Bukittinggi - Baso - Batusangkar	Pt. Bintang Utara Transport
			Pt. Grand Son Indah
			Pt. Harapan Mama Transport
			Pt. Minang Jaya Transport
			Pt. Ras Jaya Transport
			Pt. Haji Maswardi Sekeluarga
90	75	Bukittinggi - Padang Panjang - Batusangkar	Pt. Silvia Indah Mandiri
91	76	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Balai Tengah	Pt. Mata Air Lintau
92	77	Bukittinggi - Payakumbuh - Balai Tengah	Pt. Doris Abadi Transport
			Pt. Mata Air Lintau
			Pt. Multi Karya Setangkai
93	78	Bukittinggi - Padang Panjang - Sumpur - Malalo	Pt. Carano Minang Transpor
			Pt. Tanjung Jaya Mutiara
94	79	Bukittinggi - Pd. Luar - Pasar Amur - Koto Baru - Pandai Sikek - Koto Laweh	Pt. Pelita Indah Travel
95	80	Bukittinggi - Baso - Batusangkar -	Pt. Permata Bunda Transport
			Pt. Grand Son Indah

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung	Pt. Muaro Jaya Transport
96	81	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung	Pt. Tanjung Jaya Mutiara
97	82	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao	Pt. Silvia Indah Mandiri
98	-	Bukittinggi - Payakumbuh - Balai Tengah - Sitangkai - Kumanis - Sumpur Kudus	-
99	83	Bukittinggi - Padang Panjang - Batusangkar - Sitangkai - Kumanis - Sumpur Kudus	Pt. Karya Abadi Jaya Utama
100	84	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Painan	Pt. Sinamar Transport Mandiri
101	85	Bukittinggi - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan - Balai Selasa	Pt. Zona Sikumbang Jaya
			Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
102	86	Bukittinggi - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan - Balai Selasa - Tapan	Pt. Zona Sikumbang Jaya
			Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
103	87	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	Pt. Melsy Anugrah Transport
104	88	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat	Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Khatulistiwa Bonjo Pusako
105	-	Bukittinggi - Kumpulan - Malampah - Pd. Sawah - Kinali - Sp. Empat	-
106	89	Bukittinggi - Kumpulan - Malampah - Pd. Sawah - Sp. Empat - Uj. Gading - Air	Pt. Famili Ceria Group

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Bangis	
107	90	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Kinali - Sp. Empat	Pt. Bintang Rosa Transport
108	91	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Kinali - Sp. Empat - Talu	Pt. Famili Ceria Group
109	92	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading	Pt. Harmoni Lubuk Basung
110	93	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	Pt. Bintang Rosa Transport
			Pt. Famili Ceria Group
			Pt. Bintang Pasaman Express
111	94	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Desa Baru	Pt. Bintang Rosa Transport
			Pt. Famili Ceria Group
112	95	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Sasak	Pt. Famili Ceria Group
113	96	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Lb. Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh	Pt. Tri Saudara Ekspres
114	97	Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Lb. Selasih - Pd. Aro	Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Ricky Rajo Transport
115	-	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Sp. Koto Baru - Ampalu	-
116	-	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Sei. Dareh - Koto Baru - Tj. Simalidu	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
117	98	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	Pt. Jasa Rizki Group
			Pt. Silvia Indah Mandiri
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Tanjung Jaya Mutiara
			Pt. Danau Raya Ibu
			Pt. Tampalo Prima Group
118	99	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Abai Siat - Sitiung	Pt. Muaro Jaya Transport
119	-	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Timpeh	-
120	100	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok	Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Carano Minang Transpor
			Pt. Tanjung Jaya Mutiara
121	-	Payakumbuh - Piladang - Rao Rao - Batusangkar - Talawi - Sawahlunto	-
122	-	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto	-
123	-	Payakumbuh - Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping	-
124	101	Payakumbuh - Gadut - Halaban	Pt. Putra Adios Transport
			Pt. Tintin Transport Sukra
			Pt. Talago Jaya Prima
125	102	Payakumbuh - Limbanang - Suliki	Pt. Putra Agung Sepakat
			Pt. Putra Adios Transport
			Pt. Tintin Transport Sukra
			Pt. Talago Jaya Prima
			Pt. Rns Transport Suliki
126	103	Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	Pt. Putra Agung Sepakat
			Pt. Putra Adios Transport
			Pt. Tintin Transport Sukra

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
			Pt. Talago Jaya Prima
127	104	Payakumbuh - Suliki - Baruh Gunung	Pt. Putra Adios Transport
128	105	Payakumbuh - Limbanang - Mahat	Pt. Putra Adios Transport
129	106	Payakumbuh - Batu Hampar - Suayan	Pt. Putra Adios Transport
130	-	Payakumbuh - Taeh - Mungka	-
131	-	Payakumbuh - Pd. Lawas - Talang Maur	-
132	-	Payakumbuh - Tj. Pauh - Pkl. Koto Baru	-
133	107	Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Gn. Malintang - Ma. Peti	Pt. Kapur Indah Abadi
134	-	Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Tj. Pauh (Batas Riau)	-
135	108	Payakumbuh - Halaban - Balai Tengah	Pt. Yudha Transport Ekspres
			Pt. Doris Abadi Transport
136	109	Payakumbuh - Tj. Alam - Tabek Patah - Batusangkar	Pt. Yudha Transport Ekspres
			Pt. Grand Son Indah
			Pt. Harapan Mama Transport
			Pt. Minang Jaya Transport
			Pt. Haji Maswardi Sekeluarga
137	-	Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Muaro - Sijunjung	-
138	-	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao	-
139	110	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Painan	Pt. Zona Sikumbang Jaya
			Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Ricky Rajo Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
140	111	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru	Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Ricky Rajo Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		- Balai Selasa	
141	112	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Balai Selasa - Tapan	Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Ricky Rajo Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
142	113	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Pariaman	Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Melsy Anugrah Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
143	-	Payakumbuh - Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat	-
144	114	Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	Pt. Tampalo Prima Group
145	115	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	Pt. Ayah Ibu Transport
			Pt. Multi Karya Setangkai
			Pt. Rencana Baru Transport
			Pt. Tampalo Prima Group
146	116	Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai - Kt. Besar	Pt. Sinamar Transport Mandiri
147	-	Padang Panjang - Kayu Tanam - Sicincin	-
148	117	Padang Panjang - Kubu Kerambil - Simabur - Batusangkar	Pt. Karya Abadi Jaya Utama
			Pt. Silvia Indah Mandiri
149	-	Solok - Sawahlunto	-
150	-	Solok - Ombilin - Bukik Siangok - Batusangkar	-
151	118	Solok - Ombilin - Kubu Kerambil - Simabur -	Pt. Yanti Citra Pelangi

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Batusangkar	
152	-	Solok - Sumani - Sulit Air - Tj. Balik	-
153	119	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang	Pt. Danau Raya Ibu Pt. Tri Saudara Ekspres
154	120	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Tl. Babungo	Pt. Tri Saudara Ekspres
155	121	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung	Pt. Danau Raya Ibu Pt. Muaro Jaya Transport
156	-	Solok - Ma. Panas - Bukik Sileh - Kp. Bt. Dalam - Alahan Panjang - Surian - Muara Labuh	-
157	122	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh	Pt. Mekar Maju Ekspres
158	123	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh - Pd. Aro	Pt. Tri Saudara Ekspres Pt. Mekar Maju Ekspres Pt. Usaha Murni Pratama
159	-	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh - Liki - Leter W	-
160	124	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	Pt. Rencana Baru Transport Pt. Tampalo Prima Group
161	125	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Abai Siat - Sitiung Iv	Pt. Muaro Jaya Transport
162	-	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Timpeh	-
163	-	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Sitiung - Tj. Simalidu	-
164	-	Sawahlunto - Talawi - Pd. Ganting - Batusangkar	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
165	-	Sawahlunto - Tj. Ampalu - Sijunjung	-
166	126	Sawahlunto - Ma. Kalaban - Solok - Lubuk Selasih - Padang - Pasar Baru - Painan	Pt. Tampalo Prima Group
167	-	Malalak - Tandikek - Sp. Koto Mambang - Sicincin	-
168	127	Lubuk Basung - Maninjau - Matur - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Pd. Sibusuk - Sijunjung	Pt. Tampalo Prima Group
169	-	Malalak - Tandikek - Sp. Koto Mambang - Sariak - Pariaman	-
170	128	Lubuk Basung - Pariaman - Sicincin - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	Pt. Tampalo Prima Group
171	-	Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	-
172	129	Rao - Panti - Talu - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	Pt. Famili Ceria Group
173	130	Lubuk Sikaping - Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	Pt. Tampalo Prima Group
174	-	Batusangkar - Talawi - Sawahlunto - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao	-
175	131	Batusangkar - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan	Pt. Batusangkar Indah Transport
176	-	Batusangkar - Padang Panjang -	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	
177	132	Batusangkar - Padang Panjang - Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat	Pt.Helmi Putra Transport
178	133	Batusangkar - Balai Tengah - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	Pt. Doris Abadi Transport
179	134	Sijunjung - Pd. Sibusuk - Solok - Padang Panjang - Pariaman	Pt. Melsy Anugrah Transport
180	-	Pariaman - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	-
181	-	Ma. Labuh - Alahan Panjang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	-
182	135	Cadangan	Pt. Harun Panduko Sati (Hps)
			Pt. Pelita Indah Travel
			Pt. Putra Salam Prima
			Pt. Putra Adios Transport
			Pt. Yudha Transport Ekspres
			Pt. Karya Abadi Jaya Utama
			Pt. Trans Mitra Ibu
			Pt. Melsy Anugrah Transport
			Pt. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			Pt. Bintang Rosa Transport
			Pt. Lubuk Basung Express
			Pt. Penampung Jaya Lemersing
			Pt. Harmonis Ceria Wisata
Pt. Bahagia Family Express			
Pt. Talago Jaya Prima			

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
			Pt. Sinamar Transport Mandiri
			Pt. Son Tania Transport
			Pt. Sarah Nursyifa Transport
			Pt. Bintang Utara Transport
			Pt. Tanjung Jaya Mutiara
			Pt. Multi Karya Setangkai
			Pt. Danau Raya Ibu
			Pt. Jasa Malindo Ibu
			Pt. Tampalo Prima Group
183	136	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman	Pt. Oto Kawan Transport
JUMLAH : 183	JUMLAH : 136		

Sumber Data : Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas terdapat 136 lintasan trayek yang dilayani oleh perusahaan angkutan pada tahun 2023.

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan Intas penyeberangan pada provinsi tersebut}} \\
 &= \frac{4 \times 0,5}{4} \\
 &= 0,5
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Untuk kondisi angkutan penyeberangan di wilayah Sumatera Barat saat ini terdiri dari 4 (empat) lintasan trayek, dan untuk ke 4 (empat) Lintasan tersebut sudah dilayani oleh angkutan penyeberangan.

Tabel III. 4 Lintasan angkutan penyeberangan di Sumatera Barat

Nama Lintas	Jarak (Mil)
Padang – Siberut	82
Siberut – Tua Pejat	62
Tua Pejat – Sikakap	74,6
Padang – Sikabalu	90

Sumber data: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9496 Tahun 2022 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis tahun anggaran 2023 (Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat) **(Terlampir)**

Kegiatan pengoperasian terhadap kapal Penyeberangan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang dengan mengoperasikan 2 (dua) unit kapal Penyeberangan yaitu KMP. Ambu-Ambu dan KMP Gambolo.

Setelah didapatkan nilai IK 1 dan IK 2, berikut ini didapatkan Rasio konektivitas Provinsi Tahun 2023 = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

$$\begin{aligned} &= (0,743 \times 70) + (0,5 \times 30) \\ &= 52,02 + 15 \\ &= 67,02 / 0,670 \end{aligned}$$

Rasio Konektivitas 0,670 artinya sebanyak 67,02% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan laut.

Tabel III. 5 Target dan realisasi Rasio Konektivitas

Tujuan : Meningkatkan konektivitas antar wilayah			
Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
Rasio Konektivitas	0,676	0,670	99,11 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan target dari Kementerian Perhubungan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Provinsi Sumatera Barat dalam melayani wilayah yang ada di Sumatera Barat, serta dengan melakukan penghitungan rasio konektivitas Provinsi pada tahun awal RPJMD 2021 – 2026, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 menetapkan target rasio konektivitas yaitu 0,676, namun untuk realisasinya hanya 0,670 atau dengan capaian sebesar 99,11 %.

Tidak tercapainya target rasio konektivitas ini disebabkan beberapa hal, salah satunya yaitu masih adanya trayek – trayek yang tidak lagi dilalui oleh operator yang beroperasi serta masih adanya perusahaan angkutan umum yang belum

melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam mengurus proses perizinan, sehingga izinya tidak ada.

Kemudian untuk mengatasi hal itu, upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perhubungan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukannya sosialisasi kepada para pengusaha angkutan umum untuk dapat mengisi trayek – trayek yang sudah tidak dilalui oleh operator yang beroperasi
- Melakukan pengawasan angkutan AKDP dan AJDP serta angkutan lainnya dimana untuk pengawasannya langsung ke perusahaan angkutan serta memberikan teguran kepada pengusaha angkutan yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan memiliki tujuan meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikiator kinerja tujuan rasio konektivitas, kemudian untuk sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan jasa transportasi dan indikator kinerja sasarannya yaitu jumlah trayek yang di akses dan jumlah penumpang terangkut angkutan umum.

Tabel III. 6 Tabel sasaran strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi)

Tujuan : Meningkatnya konektivitas antar wilayah IK : Rasio Konektivitas	
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah trayek yang diakses
	2. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Sumber data: Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

C.1.1. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi)

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi" dengan 2 buah indikator kinerja:

1. Jumlah trayek yang diakses
2. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 7 Target dan realisasi sasaran strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah trayek yang diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 %
		2. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum	18.500.000 orang	18.906.971 orang	102,19 %
Capaian sasaran strategis					101,09 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan jasa transportasi di Sumatera Barat pada tahun 2023, yaitu dengan rata-rata sebesar 101,09 % dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik, serta dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu) semuanya mencapai target.

Selanjutnya capaian masing-masing indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

C.1.1.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Berdasarkan tabel diatas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu :

1. Indikator Kinerja Jumlah Trayek yang diakses

Jumlah Trayek yang di Akses di tahun – n

Pencapaian indikator ini dapat dilihat dengan adanya rekomendasi penambahan trayek angkutan perintis, serta adanya pengawasan angkutan yang telah beroperasi, dan didorong dengan adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan.

Berdasarkan renstra tahun 2021 – 2026, penetapan target jumlah trayek yang diakses adalah 6 trayek yang ada di Sumatera Barat yang akan dilakukan pengawasan pada tahun 2023, yaitu:

1. Trayek angkutan perintis Damri

Angkutan perintis damri merupakan angkutan di beberapa rute pelosok di Sumatera Barat, beroperasinya angkutan perintis untuk menghubungkan antara daerah terpelosok, karena tidak adanya penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Adapun untuk pengadaan sarana bus perintis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan dioperasikan oleh Perum Damri. Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan perintis, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selalu berkoordinasi dengan pihak operator, Pemerintah Kab / Kota untuk mengetahui faktor – faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan perintis sehingga dapat diambil langkah – langkah didalam pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Berikut ini jaringan trayek angkutan jalan perintis Tahun 2023

Tabel III. 8 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023;

Trayek yang dilayani	Jarak (Km)	Kab / Kota
Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III	41	Dharmasraya
Pulau Punjung - Sikabau - Simp. 3 Koto Baru – Ampalu	40	Dharmasraya
Padang Aro – Uluh Suliti	62	Solok Selatan
Tua Pejat - Sioban (Kab. Kepulauan Mentawai)	45	Kab. Kep. Mentawai
Pariaman - Urek Kaji - P.Kambar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	24	Kab Padang Pariaman
Poltekel Sumbar - Pasar Usang - Lubuk Alung - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	31	Kab Padang Pariaman
Terminal Simpang IV - Bateh Samui	96	Pasaman Barat

Sumber data: Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No KP-DRJD 8613 Tahun 2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023 (Bidang APP) **(SK Terlampir)**

2. Trayek AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi)

Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Barat 2023 terdapat 183 trayek, sesuai yang dijelaskan pada indikator kinerja tujuan Rasio Konektivitas pada tabel **III.3 (halaman 22)**

3. Trayek AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)

AJDP adalah angkutan antar jemput melalui Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Berikut ini realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 9 Realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di provinsi sumatera barat

No	Kode trayek	Lintasan trayek
1	1112410	Padang – surantih
2	5111201	Padang – bukittinggi
3	5111301	Padang - payakumbuh
4	5111401	Padang - padang panjang
5	5111501	Padang – solok
6	5111601	Padang – sawahlunto
7	5111701	Padang - padang sago
8	5111801	Padang - palembayan
9	5111802	Padang - lubuk basung
10	5111901	Padang - lubuk sikaping
11	5111902	Padang - kab. Pasaman
12	5112001	Padang - koto tinggi
13	5112002	Padang - baruh gunung
14	5112003	Padang - mungka
15	5112004	Padang - suliki
16	5112101	Padang - batusangkar
17	5112201	None
18	5112401	Padang - painan
19	5112402	Padang - kambang
20	5112403	Padang - indrapura
21	5112404	Padang - lunang silaut
22	5112411	Padang - air haji
23	5112412	Padang -tapan
24	511245	Padang - bayang
25	511246	Padang - surantih
26	511247	Padang - balai Selasa
27	5112501	Padang - pariaman
28	5112601	Padang - kab. Pasaman barat

No	Kode trayek	Lintasan trayek
29	5112701	None
30	5112801	Padang - sei.rumbai
31	5121701	None
32	5121801	Bukittinggi - lubuk basung
33	5121802	Bukittinggi - rao
34	5121901	Bukittinggi- lubuk sikaping
35	5121902	Bukittinggi - rao
36	512193	Bukittinggi - kab. Pasaman
37	512194	Bukittinggi - kab. Pasaman
38	5122201	None
39	5122601	Bukittinggi - air bangis
40	5122602	Bukittinggi - talu
41	5122603	Bukittinggi - pasaman barat
42	5122801	Bukittinggi - sei. Rumbai
43	5142401	None
44	5142601	None
45	5142801	None
46	5181801	Padang - lubuk sikaping

Sumber data : Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

4. *Trayek angkutan laut perintis*

Angkutan laut adalah angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.

Angkutan laut perintis merupakan sebagai salah satu penopang terhadap kehidupan ekonomi didaerah yang memiliki wilayah perairan terpencil, terisolir, dan terluar dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Tabel III. 10 Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2023

Armada Kapal	Trayek	Ket
KM. Sabuk Nusantara 37 1.200 GT (tonase kotor)	<u>Trayek R-3</u> Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 40 - Siberut / Mailepet - 26 - Sikabalu / Pokai - 12 - Labuhan Bajau - 40 - Sigologolo - 17 - Saeru - 34 - P.Tello - 48 - Teluk Dalam - 97 - Sibolga - 97 - Teluk dalam - 48 - P.Tello - 34 - Saeru - 17 - Sigologolo - 80 - Air Bangis - 92 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabalu / Pokai - 26 - Siberut / Mailepet - 40 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	R3 = lama hari berlayar adalah 13 hari dengan 28 voyage, 984 mil
KM. Sabuk Nusantara 68 2.000 GT (tonase kotor)	<u>Trayek R-4</u> Teluk Bayur - 89 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabalu / Pokai - 12 - Muara Saibi / Subeleng - 14 - Siberut / Mailepet - 20 - Peipei / Mabukkuk - 30 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 18 - Sioban - 33 - Pasapat - 13 - Sikakap - 62 - Sinakak - 62 - Sikakap - 90 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 120 - Sikakap - 13 - Pasapat - 33 - Sioban - 16 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	R4 = lama hari berlayar adalah 14 hari dengan 25 voyage, 1013 mil

Sumber data: Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL/675/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang jaringan trayek angkutan laut perintis tahun anggaran 2023 (Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat)
(SK Terlampir)

5. Trayek Kapal Penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Kondisi Angkutan penyeberangan di wilayah Sumatera Barat saat ini melayani 4 (empat) Lintasan dari Kota Padang – Kab. Kep. Mentawai, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan sembilan bahan pokok,

Tabel III. 11 Lintasan kapal penyeberangan Sumatera Barat

Nama Lintas	Jarak (Mil)
Padang – Siberut	82
Siberut – Tua Pejat	62
Tua Pejat – Sikakap	74,6
Padang – Sikabalu	90

Sumber data: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9496 Tahun 2022 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis tahun anggaran 2023 (Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat **(Terlampir)**)

Kegiatan pengoperasian terhadap kapal Penyeberangan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang dengan mengoperasikan 2 (dua) unit kapal Penyeberangan yaitu KMP. Ambu-Ambu dan KMP Gambolo.

6. Trayek / jaringan jalur Kereta Api

Berikut ini jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat

Tabel III. 12 Jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2023

No	Kelas KA	Nama Kereta Api	Jumlah KA	Jenis perjalanan	Lintasan Pelayanan
Jenis Pelayanan : Ekonomi					
1	Ekonomi	KA Pariaman Exspres	9	8 reguler 1 fakultatif	Naras - Pauh Lima Padang – Naras
	Bandara	KA Minang Kabau Ekspres	12	12 Reguler	BIM - Pulau Air
	KRD Ekonomi	KA Lembah Anai	6	6 reguler	Kayu Tanam - Duku – BIM
	Wisata	KA Mak Itam	2	2 Fakultatif	Sawahlunto - Muaro Kalaban
	Jumlah		29	29	
Jenis Pelayanan : Barang					
2	Semen Klinker	KA Karang Putih	34	24 reguler 10 fakultatif	Bukit putus - Indarung
	CPO	KA Nabutus CPO	2	2 Fakultatif	Bukit putus - Naras
	Jumlah		36	36	

Sumber data: Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-DJKA 69 tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang grafik perjalanan kereta api pada jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2023 (Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat) **(Terlampir)**

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel target dan realisasi indikator kinerja Jumlah trayek yang di Akses

Tabel III. 13 Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Trayek Yang diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Dengan target berdasarkan renstra yaitu 6 trayek dapat terealisasi sebesar 6 trayek dengan capaian kinerja 100 %.

Hal itu dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan Dinas Perhubungan berupa rekomendasi trayek angkutan perintis, adanya pengawasan angkutan yang telah beroperasi, dan didorong dengan adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan, serta telah dilakukannya survei – survei terkait angkutan di Sumatera Barat yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan nantinya.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja jumlah trayek yang di akses

Tabel III. 14 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah trayek yang diakses	6 Trayek	6 Trayek	6 Trayek	6 Trayek	6 Trayek	6 Trayek

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Indikator kinerja Jumlah trayek yang diakses dengan target berdasarkan renstra yaitu sebesar 6 Trayek pada tahun 2021 – 2023, dan dapat terealisasi sebesar 6 Trayek dengan capaian kinerja 100 %. Hal ini dimaksudkan pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan dan pada semua trayek – trayek angkutan yang ada di Sumatera Barat.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut tabel indikator kinerja jumlah trayek yang di akses dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Tabel III. 15 Target Jumlah Trayek yang di Akses berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 - 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah trayek yang di akses	6 trayek	6 trayek	6 trayek	6 trayek	6 trayek	6 trayek

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan target pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026, yaitu 6 trayek, dan diharapkan sampai pada tahun 2026 (Tahun akhir resntra 2021 – 2026) semua jaringan trayek dapat diawasi dengan baik agar pelayanan angkutan semakin bagus.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 16 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Jumlah Trayek Yang Diakses	Adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan	Dari kegiatan pengawasan didapat informasi terkait kondisi sarana dan prasarana angkutan yang ada di Sumatera Barat yang masih belum maksimal	Sudah dilakukannya upaya – upaya kooordinasi maupun upaya secara bersurat kepada stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan, maupun kanwil Perhubungan yang berlokasi di Sumatera Barat selaku pelaksana kegiatan angkutan (BPTD Wil III Sumbar, Balai Teknik Perkeretaapian, KSOP), maupun koordinasi kepada Operator angkutan (PT KAI, Perum Damri, dll)	Upaya perbaikan kedepannya untuk ketercapaian indikator kinerja jumlah trayek yang diakses adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan perintis Damri Akan dilakukan koordinasi dengan Kab / Kota, operator angkutan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku penyelenggara angkutan perintis terkait lintasan / trayek baru, sehingga pelayanan angkutan perintis tepat sasaran (lintasan yang benar – benar menjadi lintasan yang belum dilayani) sehingga diharapkan angkutan perintis nantinya sebagai pemutus mata rantai kesenjangan keterbatasan penyediaan layanan umum di bidang transportasi 2. Angkutan AKDP dan AJDP Akan dilakukan upaya untuk mengingatkan perusahaan untuk lebih teliti dalam melengkapi dan mengajukan persyaratan ke Dishub, sehingga proses penerbitan rekomendasi teknis perizinan angkutan umum dapat berjalan dengan lancar, dan angkutan AKDP dan AJDP dapat beroperasi sesuai standar, serta akan menyampaikan informasi terkait trayek yang sudah tidak dilalui oleh angkutan kepada operator angkutan, sehingga trayek tersebut dapat diisi oleh operator angkutan yang ada 3. Akan laut perintis dan angkutan penyeberangan Akan dilakukan upaya pembahasan usulan jaringan trayek angkutan laut dan angkutan penyeberangan yang dapat mengurangi rantai kesenjangan keterbatasan penyediaan layanan umum di bidang transportasi laut, serta melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengembangan pelabuhan dan angkutan pelayaran di Sumatera Barat

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1) Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran jumlah trayek yang diakses, serta perhitungan tingkat efisiensi

Tabel III. 17 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Desember	% per anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp 78.880.738	Rp 73.558.213	93,25
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 5.025.300	Rp 3.352.000	66,70
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Rp 52.082.550	Rp 48.664.760	93,44
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Rp 75.374.511	Rp 71.189.497	94,45
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan	Rp	Rp	94,35

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Desember	% per anggaran
Provinsi	47.840.000	45.135.000	
TOTAL	Rp 259.203.099	Rp 241.899.470	93,32

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek	6 Trayek	100%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/974/ED/GSB/2023 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2023, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(259.203.099 \times 100) - 241.899.470}{(259.203.099 \times 100)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 0,99$$

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja sasaran jumlah trayek yang diakses dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 0,99 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja jumlah trayek yang diakses.

Untuk efisiensi terhadap penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja, untuk kegiatan pengawasan yaitu berupa efisiensi belanja perjalanan dinas serta BBM, kemudian untuk kegiatan perizinan SIMPAU, efisiensi anggaran yaitu karena tidak adanya perangkat keras yang mengalami kendala dalam proses perizinan.

2) Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Berikut ini analisis Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pendukung dari sub kegiatan yang mendukung kinerja jumlah trayek yang diakses

Tabel III. 18 Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	<p>Dalam rangka pengawasan angkutan perintis Damri dibutuhkan SDM dengan jabatan:</p> <table border="1" data-bbox="456 711 1550 826"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengawas transportasi</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Analisis Angkutan Darat</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>-3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data diatas, untuk tindak lanjut pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan kerja sama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), yang lulusannya langsung diangkat PNS dan mengisi jabatan yang dibutuhkan.</p>	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Pengawas transportasi	1	1	0	Analisis Angkutan Darat	5	2	-3	Untuk kinerja pengawasan angkutan perintis damri, dukungan sarana kendaraan operasional bidang yang masing kurang, yaitu 1 kendaraan dinas yang kondisinya kurang laik (Tahun 2008)
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±											
Pengawas transportasi	1	1	0											
Analisis Angkutan Darat	5	2	-3											
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	<p>Dalam rangka perizinan angkutan dibutuhkan SDM dengan jabatan:</p> <table border="1" data-bbox="456 1254 1650 1331"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengelola Perizinan Angkutan Jalan</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	2	1	1	Sudah terdapat perangkat berupa komputer, printer, dan				
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±											
Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	2	1	1											

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana								
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Analisis Angkutan Darat	5	2	-3	perangkat keras lainnya terkait Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)								
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Dalam rangka pengawasan angkutan laut dibutuhkan SDM dengan jabatan: <table border="1" data-bbox="456 746 1552 831"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 746 857 783">Jabatan</th> <th data-bbox="857 746 1176 783">Kebutuhan</th> <th data-bbox="1176 746 1431 783">Eksisting</th> <th data-bbox="1431 746 1552 783">±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 783 857 831">Analisis perizinan transportasi</td> <td data-bbox="857 783 1176 831">1</td> <td data-bbox="1176 783 1431 831">0</td> <td data-bbox="1431 783 1552 831">1</td> </tr> </tbody> </table> Untuk kondisi saat ini pada bidang pelayaran, hanya memiliki satu orang staf di masing – masing unit kerja, sehingga masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Analisis perizinan transportasi	1	0	1	Terdapat sarana mobil operasional di Bidang pelayaran yang membantu operasional kegiatan di Bidang Pelayaran
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±										
Analisis perizinan transportasi	1	0	1										

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana																
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																					
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	<p>Dalam rangka pengawasan angkutan penyeberangan dibutuhkan SDM dengan jabatan:</p> <table border="1" data-bbox="454 456 1803 651"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisis perizinan transportasi</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Data ASDP</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk jabatan diatas, kondisi pada saat ini hanya SDM dengan jabatan pengelola data ASDP yang tersedia, sehingga masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai</p>				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Analisis perizinan transportasi	1	0	1	Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan	1	0	1	Pengelola Data ASDP	1	1	0	Terdapat sarana mobil operasional di Bidang pelayaran yang membantu operasional kegiatan di Bidang Pelayaran
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																		
Analisis perizinan transportasi	1	0	1																		
Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan	1	0	1																		
Pengelola Data ASDP	1	1	0																		
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN																					
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																					
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	<p>Dalam rangka pengawasan angkutan perkeretaapian dibutuhkan SDM dengan jabatan:</p> <table border="1" data-bbox="454 932 1821 1118"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengawas Perkeretaapian</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Perizinan Perkeretaapian</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk sekarang SDM yang mendukung capaian kinerja sudah tersedia</p>				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Pengawas Perkeretaapian	1	1	0	Pengelola Perizinan Perkeretaapian	1	1	0	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	0	Untuk kondisi sarana yang mendukung kinerja yaitu terdapat satu mobil operasional untuk Bidang APP di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																		
Pengawas Perkeretaapian	1	1	0																		
Pengelola Perizinan Perkeretaapian	1	1	0																		
Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	0																		

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses, yaitu dengan melakukan pengawasan, pendataan penumpang, maupun inventarisasi sarana dan prasarana pada angkutan – angkutan yang ada di Sumatera Barat, antara lain:

a) Pengawasan Angkutan Perintis (Damri).

Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan perintis dan mengawasi trayek yang dilayani oleh angkutan, serta untuk mengetahui faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan perintis sehingga dapat diambil langkah – langkah pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta nantinya dapat di koordinasikan dengan BPTD Wil III Sumatera Barat selaku pelaksana kegiatan pelayanan angkutan perintis maupun Perum Damri selaku Operator.

b) Pengawasan terhadap angkutan AKDP dan AJDP

Untuk pengawasan AKDP dan AJDP dilakukan dengan menyiapkan data perusahaan AKDP dan AJDP yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, kemudian dilakukan pengawasan dan arahan kepada perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan Surat Kartu Pengawasan (KP) dan perpanjangan izin trayek angkutan.

c) Pengawasan angkutan perintis

Bentuk kegiatan ini berupa pengawasan di pelabuhan-pelabuhan singgah serta pengawasan pengoperasian angkutan laut perintis, dimana untuk Provinsi Sumatera Barat dilayani oleh 2 (dua) unit kapal angkutan laut perintis yaitu KM. Sabuk Nusantara 37 untuk trayek R-3 dan KM. Sabuk Nusantara 68 untuk trayek R-4

Pelaksanaan kegiatan ini selain melakukan Pengawasan trayek yang dilayani, juga dilakukan Pengawasan pemberlakuan tarif kapal apakah telah sesuai dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat, serta mengawasi fasilitas yang tersedia di Pelabuhan singgah.



Pada kegiatan ini dinas perhubungan juga melakukan rapat dengan instansi terkait, membahas usulan jaringan trayek untuk tahun 2023, dan hasilnya disampaikan ke kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla) dan sudah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL 729 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Pelayanan Publik Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2024 Tanggal 20 November 2023.

- d) Pengawasan angkutan penyeberangan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan rangkaian pengawasan ke lapangan terhadap pelayanan angkutan penyeberangan untuk lintas antar Kota/Kab dalam Provinsi. Kegiatan ini berupa pengawasan baik pengoperasian dan tarif terhadap kapal penyeberangan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang sebagai operator yang mengoperasikan 2 (dua) unit kapal Penyeberangan yang ada.

Kegiatan ini juga melakukan inventarisasi baik sarana dan prasarana transportasi angkutan penyeberangan guna bahan evaluasi kedepan dalam pengambilan kebijakan, seperti perlunya perencanaan ataupun rehabilitasi dan pembangunan fisik melalui APBN Kementerian Perhubungan untuk menunjang kelancaran Angkutan Penyeberangan

- e) Melaksanakan pengumpulan dan analisis data angkutan Kereta Api
Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk terlaksananya pelayanan transportasi Perkeretaapian yang baik perlu diadakan kegiatan pengumpulan dan analisis data angkutan Kereta Api di Sumatera Barat, kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan ini sebagai upaya untuk menyatakan secara spesifik perkembangan transportasi di Sumatera Barat, serta untuk identifikasi pola pergerakan penumpang berdasarkan jumlah penumpang yang naik dan turun terhadap letak stasiun serta untuk menjadi bahan perumusan kebijakan kedepannya. Pada kegiatan ini juga dilakukan inventarisasi terkait fasilitas – fasilitas perlengkapan yang ada di dalam Kereta api.

2. Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Jumlah penumpang terangkut di Terminal Tipe B pada tahun-n

Data diperoleh dan didapatkan dari rekapan penumpang terangkut di 5 Terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat, yaitu:

- a) Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang
- b) Terminal Tipe B Koto Nan IV Kota Payakumbuh
- c) Terminal Tipe B Piliang Kab Tanah Datar
- d) Terminal Tipe B Sago Painan Kab Pesisir Selatan
- e) Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 penetapan target jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2023 adalah sebanyak 20.000.000 penumpang terangkut, namun Dinas Perhubungan melakukan perubahan target pada perjanjian kinerja kepala OPD menjadi 18.500.000, untuk penetapan target perubahan ini dengan mempertimbangkan data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 target tidak tercapai dan setelah berkoordinasi dengan Biro Organisasi maka dilakukan perubahan pada perjanjian kinerja kepala OPD tahun 2023.

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel target dan realisasi indikator jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2023

Tabel III. 19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Penumpang terangkut umum	18.500.000 orang	18.906.971 orang	102,19 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk realisasi penumpang terangkut pada tahun 2023 adalah sebanyak 18.906.971 orang, sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 102,19 %.

Berikut data jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada masing – masing terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat:

Tabel III. 20 Data Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum 2023

Terminal Tipe B	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang	7.862.319 orang
Terminal Tipe B Koto Nan IV Kota Payakumbuh	4.183.181 orang
Terminal Tipe B Piliang Kab Tanah Datar	2.463.719 orang
Terminal Tipe B Sago Painan	3.007.539 orang
Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto	1.390.213 orang
TOTAL	18.906.971 orang

Sumber data : UPTD Terminal Tipe B wilayah 1 dan wilayah 2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel III. 21 Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021, 2022, dan 2023

Indikator Kinerja	Jumlah penambahan penumpang terangkut	Jumlah penumpang terangkut angkutan umum	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Target	1.000.000	19.000.0000	18.500.000
Realisasi	1.127.254	18.650.112	18.906.971
% Capaian	113%	98,15%	102,19%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk indikator kinerja ini terdapat perbedaan antara tahun 2021 (Renstra 2016 – 2021) dengan tahun 2022, dan 2023 (Renstra 2021 – 2026), dimana untuk tahun 2021 indikator kinerjanya yaitu terkait jumlah **penambahan** penumpang terangkut, sedangkan untuk tahun 2022 – 2023 indikator kinerjanya yaitu Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum.

Namun untuk data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2021 dapat diperoleh pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Dishub 2021 yaitu sebanyak 18.127.254 orang, sedangkan untuk tahun 2022 jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2022 yaitu sebanyak 18.650.012 orang, dan pada tahun 2023 sebanyak 18.906.971 orang, sehingga dapat disimpulkan terjadi kenaikan jumlah penumpang terangkut pada tahun 2022 dan 2023

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut target jumlah penumpang terangkut angkutan umum dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Tabel III. 22 Target Jumlah penumpang terangkut angkutan umum 2021 - 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n								
	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	18.000.000	18.127.254	19.000.000	18.650.012	20.000.000	18.906.971	22.000.000	23.000.000	24.000.000

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan renstra 2021 – 2026 dapat dilihat target untuk jumlah penumpang terangkut angkutan umum dari tahun 2021 sampai dengan 2026 (tahun akhir renstra).

Untuk realisasi pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 18.906.971 orang, dan jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra (2026), maka capaiannya baru sebesar 78,77 %, sehingga hal ini nantinya akan dilakukan upaya – upaya peningkatan realisasi pada tahun – tahun selanjutnya (2024 – 2026).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 23 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	Adanya upaya meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, antara lain, seperti: 1) Meningkatkan dan memperbaiki fasilitas Terminal Tipe B 2) Melakukan upaya optimalisasi trayek angkutan umum, 3) dll	<ul style="list-style-type: none"> Adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar terminal adanya angkutan umum yang tidak memasuki terminal sehingga tidak terdata penumpang yang naik dan turun Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga 	<p>Solusi yang telah dilakukan mengatasi faktor penghambat yang ada yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengawasan (Razia) yang dilakukan di terminal terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek serta angkutan yang tidak laik jalan, kemudian kepada sopir angkutan juga diarahkan untuk selalu memasuki wilayah terminal dalam 	<p>Upaya perbaikan kedepannya untuk ketercapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe B (fasilitas utama dan penunjang) Meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas layanan angkutan umum dengan melakukan pengawasan angkutan (Razia) terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek serta angkutan yang tidak laik jalan Meningkatkan pelayanan di Terminal melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM di terminal tipe B, baik yang bersifat internal maupun eksternal Selain hal diatas, berikut ini upaya jangka panjang yang juga bisa dilakukan dalam upaya peningkatan jumlah penumpang yang diangkut: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan transportasi terpadu: Pemerintah provinsi dapat mengembangkan rencana transportasi terpadu yang mencakup pengembangan sistem AKDP yang efisien dan berkelanjutan. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan mobilitas masyarakat, perencanaan rute, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya. Investasi Infrastruktur, dimana Pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung AKDP, seperti pembangunan jalur khusus bus, halte yang ramah pengguna, dan terminal yang terintegrasi atau kerjasama dengan pihak ke III. Kebijakan Tarif yang Terjangkau: Pemerintah provinsi dapat mengatur kebijakan tarif yang terjangkau untuk meningkatkan daya saing AKDP dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
		menurunkan minat menggunakan angkutan umum	menaikkan dan menurunkan penumpang	<ul style="list-style-type: none"> d) Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah provinsi perlu mengeluarkan regulasi yang memastikan standar keselamatan, kualitas layanan, dan kenyamanan bagi penumpang AKDP. Pengawasan terhadap operator transportasi juga penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. e) Kemitraan dengan Pihak Terkait: Pemerintah provinsi perlu menjalin kemitraan dengan operator transportasi, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga terkait lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan AKDP secara efektif. f) Pengembangan Sistem Informasi Transportasi: Pemerintah provinsi dapat mengembangkan sistem informasi transportasi yang terintegrasi untuk memberikan informasi real-time tentang jadwal, rute, dan kondisi lalu lintas kepada penumpang. Hal ini akan membantu meningkatkan keterpaduan dan kemudahan penggunaan AKDP. g) Penyediaan Armada yang Memadai, yaitu dengan memastikan bahwa jumlah armada yang tersedia cukup untuk mengakomodasi permintaan penumpang. Penambahan armada atau peningkatan kapasitas armada yang ada dapat membantu mengurangi kepadatan dan waktu tunggu, serta meningkatkan kenyamanan perjalanan. h) Perluasan Jaringan dan Rute: Melakukan evaluasi terhadap rute yang ada dan menambahkan rute baru untuk mencakup wilayah yang belum terlayani dengan baik. Ini akan memperluas cakupan layanan AKDP dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat.

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1) Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum, serta perhitungan tingkat efisiensi

Tabel III. 24 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Desember	% per anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp15.000.000	Rp14.914.154	99,43
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp19.273.600	Rp11.075.645	57,47
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp76.715.240	Rp59.813.360	77,97
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp829.088.600	Rp826.074.800	99,64
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp170.604.000	Rp164.932.586	96,68
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp92.904.312	Rp80.703.601	86,87
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp85.452.750	Rp83.683.053	97,93
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp2.566.993.192	Rp2.542.406.687	99,04
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp107.524.750	Rp107.502.000	99,98
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Rp92.481.687	Rp85.516.067	92,47
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angk Org dlm Trayek	Rp5.025.300	Rp3.352.000	66,7

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Desember	% per anggaran
Kewenangan Provinsi dlm Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
TOTAL	Rp4.061.063.431	Rp3.979.973.953	98,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	18.500.000 orang	18.906.971 orang	102,19%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/974/ED/GSB/2023 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2023, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(4.061.063.431 \times 102,19) - 3.979.973.953}{(4.061.063.431 \times 102,19)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 0,99$$

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja sasaran Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 0,99 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum.

2) Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Berikut ini analisis Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pendukung dari sub kegiatan yang mendukung kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Tabel III. 25 Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana																								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																													
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																													
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terkait operasional terminal dibutuhkan SDM dengan jabatan:				Untuk sarana yang mendukung kinerja yaitu terdapat satu mobil operasional untuk UPTD Terminal Untuk prasarana seperti Komputer, printer, serta CCTV pengawasan di terminal telah tersedia																								
Pengolahan Data Retribusi Daerah	<table border="1" data-bbox="584 708 1727 935"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 708 1032 743">Jabatan</th> <th data-bbox="1032 708 1328 743">Kebutuhan</th> <th data-bbox="1328 708 1597 743">Eksisting</th> <th data-bbox="1597 708 1727 743">±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 743 1032 783">Pemeriksa Terminal</td> <td data-bbox="1032 743 1328 783">2</td> <td data-bbox="1328 743 1597 783">1</td> <td data-bbox="1597 743 1727 783">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 783 1032 823">Pengawas Angkutan dan Terminal</td> <td data-bbox="1032 783 1328 823">2</td> <td data-bbox="1328 783 1597 823">2</td> <td data-bbox="1597 783 1727 823">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 823 1032 863">Pengelola Terminal</td> <td data-bbox="1032 823 1328 863">5</td> <td data-bbox="1328 823 1597 863">5</td> <td data-bbox="1597 823 1727 863">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 863 1032 903">Operator Terminal</td> <td data-bbox="1032 863 1328 903">30</td> <td data-bbox="1328 863 1597 903">6</td> <td data-bbox="1597 863 1727 903">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 903 1032 935">Pengadministrasi Karcis</td> <td data-bbox="1032 903 1328 935">5</td> <td data-bbox="1328 903 1597 935">3</td> <td data-bbox="1597 903 1727 935">2</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting		±	Pemeriksa Terminal	2	1	1	Pengawas Angkutan dan Terminal	2	2	0	Pengelola Terminal	5	5	0	Operator Terminal	30	6	24	Pengadministrasi Karcis	5	3	2	2	1	1
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																										
Pemeriksa Terminal	2	1	1																										
Pengawas Angkutan dan Terminal	2	2	0																										
Pengelola Terminal	5	5	0																										
Operator Terminal	30	6	24																										
Pengadministrasi Karcis	5	3	2																										
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengawas Angkutan dan Terminal	2	2	0																									
	Pengelola Terminal	5	5	0																									
	Operator Terminal	30	6	24																									
	Pengadministrasi Karcis	5	3	2																									
	Untuk kondisi saat ini di terminal masih memerlukan banyak SDM dengan jabatan operator terminal																												

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana																								
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																										
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																										
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terkait fasilitas perlengkapan jalan dibutuhkan SDM dengan jabatan: Berdasarkan data diatas, untuk tindak lanjut pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga teknis di	Untuk kondisi sarana yang mendukung kinerja yaitu terdapat satu mobil operasional untuk Bidang APP di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat																								
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	<table border="1" data-bbox="589 523 1727 746"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisis Rencana Induk Jaringan transportasi Darat</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Analisis Lalu lintas</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="589 788 1727 890">Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan kerja sama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), yang lulusannya langsung diangkat PNS dan mengisi jabatan yang dibutuhkan.</p>		Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Analisis Rencana Induk Jaringan transportasi Darat	2	2	0	Analisis Lalu lintas	2	0	2	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	2	0	2	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	0				
Jabatan	Kebutuhan		Eksisting	±																						
Analisis Rencana Induk Jaringan transportasi Darat	2		2	0																						
Analisis Lalu lintas	2	0	2																							
Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	2	0	2																							
Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	0																							
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B																										
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terkait operasional terminal dibutuhkan SDM dengan jabatan:	Untuk sarana yang mendukung kinerja yaitu terdapat satu mobil operasional untuk UPTD Terminal Untuk prasarana seperti Komputer, printer, serta CCTV pengawasan di terminal telah tersedia																								
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	<table border="1" data-bbox="589 973 1727 1197"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeriksa Terminal</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Angkutan dan Terminal</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Terminal</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Operator Terminal</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Pengadministrasi Karcis</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="589 1238 1727 1305">Untuk kondisi saat ini di terminal masih memerlukan banyak SDM dengan jabatan operator terminal</p>		Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Pemeriksa Terminal	2	1	1	Pengawas Angkutan dan Terminal	2	2	0	Pengelola Terminal	5	5	0	Operator Terminal	30	6	24	Pengadministrasi Karcis	5	3	2
Jabatan	Kebutuhan		Eksisting	±																						
Pemeriksa Terminal	2		1	1																						
Pengawas Angkutan dan Terminal	2	2	0																							
Pengelola Terminal	5	5	0																							
Operator Terminal	30	6	24																							
Pengadministrasi Karcis	5	3	2																							

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana																																								
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi																																													
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terkait hal ini dibutuhkan SDM dengan jabatan: <table border="1" data-bbox="584 411 1727 823"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisis Lalu Lintas</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Angkutan Kendaraan</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksa Lalu Lintas Darat</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Pengawasan LLAJ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengatur Lalu Lintas Jalan</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Penelaah Audit Keselamatan Jalan</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksa Lalu lintas Darat</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> Untuk pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga teknis sudah dilakukan kerja sama (MoU) dengan pihak STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), yang lulusannya langsung diangkat PNS dan mengisi jabatan yang dibutuhkan.				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Analisis Lalu Lintas	3	3	0	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	3	1	Pengelola Angkutan Kendaraan	2	2	0	Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	2	1	Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10	Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0	Pengatur Lalu Lintas Jalan	2	0	2	Penelaah Audit Keselamatan Jalan	2	0	2	Pemeriksa Lalu lintas Darat	3	0	3	Untuk sarana pendukung di Bidang LLPK, terdapat 2 mobil operasional untuk membantu pelaksanaan kegiatan
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																																										
Analisis Lalu Lintas	3	3	0																																										
Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	3	1																																										
Pengelola Angkutan Kendaraan	2	2	0																																										
Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	2	1																																										
Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10																																										
Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0																																										
Pengatur Lalu Lintas Jalan	2	0	2																																										
Penelaah Audit Keselamatan Jalan	2	0	2																																										
Pemeriksa Lalu lintas Darat	3	0	3																																										
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																																													
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terkait hal ini dibutuhkan SDM dengan jabatan: <table border="1" data-bbox="584 1007 1727 1270"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksa Lalu Lintas Darat</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Pengawasan LLAJ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Keselamatan Angkutan</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	3	1	Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	2	1	Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10	Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0	Pengawas Keselamatan Angkutan	1	0	0	Untuk sarana pendukung di Bidang LLPK, terdapat 2 mobil operasional untuk membantu pelaksanaan kegiatan																
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																																										
Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	3	1																																										
Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	2	1																																										
Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10																																										
Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0																																										
Pengawas Keselamatan Angkutan	1	0	0																																										

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana												
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dalam rangka pelaksanaan kegiatan survey peta trayek, dibutuhkan SDM dengan jabatan				Untuk kondisi sarana yang mendukung kinerja yaitu terdapat satu mobil operasional untuk Bidang APP di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 416 1066 448">Jabatan</th> <th data-bbox="1077 416 1364 448">Kebutuhan</th> <th data-bbox="1364 416 1606 448">Eksisting</th> <th data-bbox="1606 416 1731 448">±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 448 1066 485">Pengawas transportasi</td> <td data-bbox="1077 448 1364 485">1</td> <td data-bbox="1364 448 1606 485">1</td> <td data-bbox="1606 448 1731 485">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 485 1066 521">Analisis Angkutan Darat</td> <td data-bbox="1077 485 1364 521">5</td> <td data-bbox="1364 485 1606 521">2</td> <td data-bbox="1606 485 1731 521">-3</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting		±	Pengawas transportasi	1	1	0	Analisis Angkutan Darat	5	2	-3			
	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±													
	Pengawas transportasi	1	1	0													
Analisis Angkutan Darat	5	2	-3														
Dinas Perhubungan sudah kerja sama (MoU) dengan pihak Sekolah Tinggi Transportasi Darat, yang lulusannya dapat mengisi jabatan yang dibutuhkan.																	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angk Org dlm Trayek Kewenangan Provinsi dlm Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam rangka perizinan angkutan dibutuhkan SDM dengan jabatan:				Sudah terdapat perangkat berupa komputer, printer, dan perangkat keras lainnya terkait Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 730 1066 762">Jabatan</th> <th data-bbox="1077 730 1364 762">Kebutuhan</th> <th data-bbox="1364 730 1606 762">Eksisting</th> <th data-bbox="1606 730 1731 762">±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 762 1066 799">Pengelola Perizinan Angkutan Jalan</td> <td data-bbox="1077 762 1364 799">2</td> <td data-bbox="1364 762 1606 799">1</td> <td data-bbox="1606 762 1731 799">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 799 1066 836">Analisis Angkutan Darat</td> <td data-bbox="1077 799 1364 836">5</td> <td data-bbox="1364 799 1606 836">2</td> <td data-bbox="1606 799 1731 836">-3</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting		±	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	2	1	1	Analisis Angkutan Darat	5	2	-3			
	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±													
	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	2	1	1													
Analisis Angkutan Darat	5	2	-3														
Berdasarkan data diatas, masih perlu dilakukan penambahan SDM dengan kompetensi sesuai persyaratan yang dibutuhkan																	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum yaitu dengan meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, antara lain sebagai berikut:

a) Meningkatkan Prasarana Perhubungan, yaitu:

Adanya kegiatan terkait penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan Provinsi, yaitu:

- Melakukan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ) Tenaga Surya Lengan Tunggal, delineator, rambu jalan, rambu jalan tiang f di Kab Agam
- Melakukan Pemasangan cermin tikung, Guardrail, rambu jalan di Kab Pasaman
- Pengadaan Komponen perlengkapan jalan berupa Guardrail dan rambu jalan di Kab Tanah Datar

Serta adanya kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) serta melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, yaitu:

- Melakukan perbaikan saluran air di terminal Tipe B Kota Payakumbuh
- Pembangunan toilet di terminal sago Painan Kab Pesisir Selatan

b) Mengoptimalkan trayek angkutan umum

- Pelaksanaan survey peta trayek tahun 2023, yang nantinya akan dibuat peta trayek AKDP serta akan diperoleh data trayek yang tumpang tindih dengan trayek lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan dan evaluasi pelayanan trayek angkutan umum, data kantong penumpang yang nantinya dapat dilakukan untuk penentuan halte, serta akan menjadi pertimbangan terkait kebutuhan angkutan menuju lokasi lokasi survey dan berdasarkan data survey tersebut akan dibuatkan peta trayek yang juga akan dipasang di Terminal Tipe B Provinsi Sumatera Barat
- Tersedianya Pelayanan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)

c) Meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik

- Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan (Rampcheck)

C.1.2. Perbandingan Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi) dengan Standar Nasional (Kementerian Perhubungan)

1. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan adalah "Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden".

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
3. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan."

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, dimana untuk sektor perhubungan terdapat pada misi ke 6 (enam) "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan".

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 tersebut adalah "terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata".

Misi 6 ini diuraikan menjadi 5 sasaran, dimana salah satunya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, yaitu: "Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi" dengan Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas.



Kemudian sebagai OPD Penanggung Jawab, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tujuan – tujuan yang harus dicapai berdasarkan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kementerian Perhubungan, dan Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut, dimana kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan secara umum yaitu terkait pembangunan infrastruktur yang dapat membantu penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar Kawasan serta meningkat keselamatan transportasi.

Tabel III. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2023			
						Target		Realisasi	
Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah IK: Rasio Konektivitas	Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Rasio konektivitas dan aksesibilitas nasional	Jumlah trayek yang di akses	0,763	6 trayek	0,76 (99,61%)	6 trayek
					Jumlah penumpang terangkut angkutan umum		18.500.000 orang		18.906.971 orang

Sumber data: terkait tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target dan realisasi Kementerian Perhubungan: http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian/iku/2023/001/001

Dari tabel diatas dapat disimpulkan yaitu terkait Rasio Konektivitas, dimana untuk Kementerian Perhubungan rasio konektivitas merupakan indikator kinerja **sasaran**, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Rasio Konektivitas merupakan Indikator Kinerja **tujuan**.

Setelah dilakukan penghitungan, Rasio Konektivitas Provinsi yaitu 0,670 atau 67 % wilayah Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut.

Dalam penghitungan rasio konektivitas Kementerian perhubungan memiliki rumus sendiri dalam penghitungannya, sedangkan untuk pemerintah daerah yang berada di bawah Kemendagri berpatokan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C.2 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas)

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan terwujudnya keselamatan transportasi dengan indikator kinerja tujuan adalah rasio angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam upaya menekan angka kecelakaan, pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan angka kejadian kecelakaan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK).

Berdasarkan RUNK tersebut keberhasilan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bisa dilihat dari rasio angka kecelakaan yang merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan dengan parameter tertentu, seperti jumlah penduduk, jumlah kendaraan, atau jarak tempuh, yang hasilnya dapat menggambarkan gambaran proporsi kecelakaan dalam suatu konteks tertentu, membantu analisis dan perbandingan risiko kecelakaan di berbagai wilayah.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja tujuan rasio angka kecelakaan lalu lintas, melihat terwujudnya keselamatan transportasi menggunakan indikator angka kematian per 100.000 populasi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kinerja keselamatan jalan.

Berikut ini penghitungan rasio angka kecelakaan pada tahun 2023:

Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah total kematian lalu lintas dalam setahun} \times 100.000}{\text{Jumlah penduduk di daerah tersebut}} \\ &= \frac{480 \times 100.000}{5.757.210} \\ &= 8,34 \end{aligned}$$

Berdasarkan data diatas, diketahui rasio angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 adalah 8,34, yang mana angka ini dapat menggambarkan gambaran proporsi kecelakaan, dan untuk menjadi perbandingan risiko kecelakaan di wilayah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya maupun tahun – tahun selanjutnya. Berikut ini gambaran rasio angka kecelakaan di wilayah Sumatera Barat

Tabel III. 27 Target dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas

Tujuan : Terwujudnya keselamatan transportasi				
Indikator Kinerja : Rasio angka kecelakaan lalu lintas				
Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah total kematian dalam setahun	Rasio angka kecelakaan lalu lintas	
			Target	Realisasi
2020	5.534.472	454	-	8,20
2021	5.580.232	464	10,13	8,32
2022	5.640.629	528	9,62	9,36
2023	5.757.210	480	9,26	8,34

Sumber data:

- Jumlah penduduk tahun 2021 – 2022 diperoleh dari situs: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html> (Data Tahun 2021-2022 dari situs bersumber dari Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni))
- Jumlah penduduk tahun 2023 diperoleh dari : Buku proyeksi penduduk Kab / Kota Provinsi Sumatera Barat 2020 - 2035 hasil sensus penduduk 2020 yang diterbitkan BPS Provinsi Sumatera Barat yang dirilis bulan Juli tahun 2023
- Jumlah total kematian dalam setahun diperoleh dari data kecelakaan lalu lintas oleh Ditlantas Polda Sumbar

Berdasarkan Renstra tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menetapkan target rasio angka kecelakaan tahun 2023 adalah sebesar 9,26. Penetapan angka ini dilakukan pada saat penyusunan renstra pada tahun 2021, dimana pada saat itu penetapan target berdasarkan Buku Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021 yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, dimana diperoleh data rasio angka kecelakaan pada tahun 2020 adalah 8,20.

Kemudian dengan adanya pandemi covid-19 pada saat itu, ada beberapa kebijakan yaitu membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan perkiraan akan berakhirnya pandemi covid – 19, sehingga akan terjadi kenaikan terhadap penggunaan kendaraan bermotor dan angka kecelakaan pada tahun 2021, maka kami menetapkan target pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,13 dengan perkiraan akan terjadi kenaikan angka kecelakaan dengan korban meninggal sebanyak ± 100 orang dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk penetapan target pada tahun 2022 dan tahun selanjutnya kami memperkirakan akan terjadi penurunan angka kecelakaan dengan korban meninggal dunia ± 20 orang dari tahun sebelumnya, sehingga diperoleh target pada tahun 2023 adalah sebesar 9,26.

Kemudian untuk realisasi tahun 2023 dapat dilihat untuk target rasio angka kecelakaan lalu lintas tercapai dengan capaian 110 %, dikarenakan untuk rasio

angka kecelakaan lalu lintas akan lebih bagus ketika nilainya semakin kecil, yang menggambarkan angka kecelakaan lalu lintas semakin menurun.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini tidak lepas dari lima pilar aksi keselamatan jalan yaitu:

1. Sistem yang berkeselamatan (Bappeda),
2. Jalan yang berkeselamatan (Dinas BMCKTR),
3. Kendaraan yang berkeselamatan (Dinas Perhubungan),
4. Pengguna jalan yang berkeselamatan (Polri),
5. Penanganan pra dan pasca kecelakaan (Dinkes dan jasa raharja).

Seluruh stakeholder berupaya untuk mewujudkan penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, yang mana hal ini juga sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Keselamatan Jalan (RUNK).

Berdasarkan rencana strategis tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan memiliki tujuan terwujudnya keselamatan transportasi dengan indikator kinerja tujuan adalah rasio angka kecelakaan lalu lintas, kemudian untuk sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi dan indikator kinerja sasarannya yaitu v/c rasio di jalan provinsi

Tabel III. 28 Tabel sasaran strategis 1 (Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi)

Tujuan : Terwujudnya keselamatan transportasi IK : Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas di Jalan Provinsi	V/C Rasio di Jalan Provinsi

Sumber data : Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Hubungan antara rasio angka kecelakaan lalu lintas dan kinerja lalu lintas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kinerja lalu lintas mencakup volume kendaraan, kecepatan, kapasitas jalan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Rasio kecelakaan yang tinggi mungkin menunjukkan rendahnya kinerja lalu lintas atau sebaliknya.

Faktor-faktor seperti infrastruktur jalan, penegakan aturan lalu lintas, dan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berperan dalam membentuk hubungan ini. Upaya untuk meningkatkan kinerja lalu lintas, penegakan aturan, dan kesadaran keselamatan dapat berkontribusi untuk mengurangi rasio kecelakaan lalu lintas. Sebaliknya, peningkatan rasio kecelakaan bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam kinerja lalu lintas yang perlu diatasi. Sehingga efektivitas langkah-

langkah keselamatan, penegakan aturan, dan perbaikan infrastruktur jalan dapat berperan dalam mengurangi kecelakaan dan meningkatkan kinerja lalu lintas.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi

C.2.1. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi)

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi" yang dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran V/C Rasio di jalan Provinsi.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 29 Target dan realisasi sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,50	0,45	110 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan renstra Dinas Perhubungan dan dengan mempertimbangkan data dasar pada tahun 2021, maka ditetapkan target V/C rasio tahun 2023 adalah sebesar 0,50, dan untuk pengukuran V/C Rasio dapat diketahui apabila realisasi semakin tinggi (mendekati 1) maka menunjukkan kinerja lalu lintas yang tidak baik. Pada tabel diatas dapat dilihat untuk target tercapai, dengan capaian sebesar 110 %.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

C.2.1.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Berdasarkan tabel diatas, analisa capaian indikator kinerja Sasaran 2, yaitu :

1. Indikator Kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

$$\begin{aligned}
 \text{Formula Penghitungan} &= \text{V/C Rasio di jalan Provinsi} \\
 &= \text{Volume} / \text{Kapasitas} \\
 &= 1190,25 / 2664 \\
 &= 0,45
 \end{aligned}$$

Note : Untuk penghitungan kapasitas jalan berdasarkan standar MKJI 1997 (manual kapasitas jalan indonesia) dan PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia)



a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan status ruas jalan menurut fungsi dan statusnya sebagai jalan Provinsi, terdapat 65 ruas jalan provinsi di Provinsi Sumatera Barat.

Namun dari 65 ruas jalan provinsi, terdapat 5 Ruas jalan provinsi yang belum terhubung / belum dapat digunakan secara optimal. Dengan ketersediaan dan keterbatasan anggaran yang dimiliki tidak memungkinkan seluruh ruas dilakukan perhitungan Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi. Pada tahun 2023 dilakukan perhitungan kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi sebanyak 12 (Dua Belas) ruas, berikut ini nama ruas yang dihitung serta nilai v/c rasio masing – masing ruasnya:

Tabel III. 30 Penetapan Ruas Jalan Provinsi Yang Dilakukan Perhitungan Terkait Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KELAS JALAN	PANJANG JALAN	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1.	P.035	Kubu Kerambil – Bts Batusangkar (Simpang. Kiambang)	III B	18,50 KM	Batipuh – Limo Kaum	Kab. Tanah Datar
2.	P.036	Baso – Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	III B	28,50 KM	Baso – Sungai Tarab	Kab Agam
3.	P.055	Sijunjung – Tanah Badantuang	III B	4,40 KM	Sijunjung	Kab. Sijunjung
4.	P.075	Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman	III B	22,50 KM	Batang Anai – Nan Sabaris	Kab. Padang Pariaman
5.	P.094	Pintu Angin – Labuah Saiyo	III B	5,61 KM	Gunung Talang	Kab. Solok
6.	P.071	Solok – Alahan Panjang	III B	46,80 KM	Lubuk Sikarah – Lembah Gumanti	Kota Solok
7.	P.025	Manggopoh - Padang Lua	III B	69,43 KM	Lubuak Basuang - Banuhampu	Kab. Agam
8.	P.008	Tj, Ampalu - Sijunjung	III B	20,00 KM	Koto VII - Sijunjung	Kab. Sijunjung
9.	P.038	Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	III B	29,60 KM	Pariangan - Barangin	Kota Sawahlunto
10.	P.031	Panti – Simpang Empat	III B	74,23 KM	Panti - Pasaman	Kab.Pasaman Barat
11.	P.068	Padang Sawah -Kumpulan	III B	36, 50 KM	Tigo Nagari - Bonjol	Kab.Pasaman
12.	P.073	Pasar Baru – Alahan Panjang	III B	44,95KM	Bayang – Lembah Gumanti	Kab.Pesisir Selatan

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 31 Realisasi kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi di provinsi Sumatera Barat tahun 2023

No	Nama ruas jalan	Volume total (smp/jam)	Kapasitas	V/c rasio	Keterangan
1.	P.035 Kubu Kerambil – Bts Batusangkar (Simpang. Kiambang)	1783	2943	0,61	VC Ratio dengan nilai 0.61 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil namun sudah perlu untuk dilakukan pencegahan arus tertahan
2.	P.036 Baso – Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	1036	2281	0,45	VC Ratio dengan nilai 0.45 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol
3.	P.055 Sijunjung – Tanah Badantuang	887	2870	0,31	VC Ratio dengan nilai 0.31 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
4.	P.075 Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman	1559	2281	0,70	VC Ratio dengan nilai 0.70 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol
5.	P.094 Pintu Angin – Labuah Saiyo	919	3504	0,26	VC Ratio dengan nilai 0.26 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
6.	P.071 Solok – Alahan Panjang	2350	2943	0,80	VC Ratio dengan nilai 0.80 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf D yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda volume mendekati kapasitas
7.	P.025 Manggopoh - Padang Lua	1350	2311	0,58	VC Ratio dengan nilai 0.58 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol
8.	P.008 Tj, Ampalu - Sijunjung	1.118	2673	0,42	VC Ratio dengan nilai 0.42 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan

No	Nama ruas jalan	Volume total (smp/jam)	Kapasitas	V/c rasio	Keterangan
					stabil.
9.	P.038 Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	697	2307	0,30	VC Ratio dengan nilai 0.30 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil.
10.	P.031 Panti – Simpang Empat	788	2307	0,34	VC Ratio dengan nilai 0.34 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil.
11.	P.068 Padang Sawah - Kumpulan	796	2491	0,32	VC Ratio dengan nilai 0.32 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil.
12.	P.073 Pasar Baru – Alahan Panjang	1000	3057	0,33	VC Ratio dengan nilai 0,33 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil.
Jumlah		14.283	31.968		
Rata - rata		1190,25	2664		
Rata – Rata Kinerja Ruas Jalan Provinsi (V/C)				0,45	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah Perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan, sehingga untuk realisasi tahun 2023 yaitu:

$$VC \text{ Rasio} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas kendaraan}}{\text{Kapasitas Ruas Jalan}}$$

$$VC \text{ Rasio} = \frac{1190,25}{2664}$$

$$VC \text{ Rasio} = 0,45$$

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui realisasi V/C rasio di ruas jalan provinsi adalah 0,45, sedangkan untuk target berdasarkan renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 adalah 0,50 sehingga persentase capaian dari V/C Rasio adalah sebesar 110 %,dikarenakan untuk V/C rasio apabila nilainya semakin besar atau mendekati 1 maka kinerja lalu lintas semakin buruk.

Dapat diketahui kinerja lalu lintas di ruas jalan Provinsi dengan VC Ratio rata - rata dengan nilai 0,45 menunjukkan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel perbandingan V/C Rasio tahun 2021, 2022, dan 2023

Tabel III. 32 Perbandingan V/C Rasio tahun 2021, 2022, dan 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
V/C Rasio di jalan Provinsi	0,54	0,52	0,50	0,52	0,53	0,45	103,70	98,07	110

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2021 (renstra 2016 – 2021) belum terdapat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait V/C Rasio. Namun pada tahun 2021 juga menjadi tahun dasar renstra 2021 – 2026, sehingga target dan realisasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel diatas.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut tabel target V/C rasio dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026

Tabel III. 33 Target V/C rasio dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n								
	2021	Realisasi	2022	Realisasi	2023	Realisasi	2024	2025	2026
V/C Rasio di jalan Provinsi	0,54	0,52	0,52	0,53	0,50	0,45	0,48	0,47	0,45

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk targetnya semakin kecil, karena untuk V/C Rasio dapat disimpulkan jika realisasi tinggi atau mendekati 1 menunjukkan kinerja lalu lintas yang tidak baik.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 34 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
V/C Rasio di jalan Provinsi	Adanya upaya – upaya meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik sehingga kinerja lalu lintas menjadi lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya angkutan atau truk yang ODOL (Over Dimensi Over Load), , sehingga menyebabkan arus kendaraan ODOL tersebut menjadi lambat di jalan raya dan juga mengakibatkan adanya jalan yang rusak, hal itu mempengaruhi kinerja lalu lintas yang ada Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga Ketika diperjalanan dapat menghambat kinerja lalu lintas yang ada Adanya angkutan travel liar Belum optimalnya angkutan umum yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait keselamatan lalu lintas 	<p>Solusi yang sudah dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya upaya penindakan yang dilakukan agar tidak ada lagi angkutan orang / barang yang tidak sesuai standar dan tidak laik jalan, karena hal ini menyebabkan kinerja lalu lintas menurun, seperti kendaraan yang kelebihan muatan akan berjalan lambat, ataupun adanya kecelakaan yang terjadi akibat kelebihan muatan, dll telah dilakukannya sosialisasi terkait keselamatan LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) 	<p>Berikut adalah beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian V/C rasio</p> <ol style="list-style-type: none"> Upaya memperkuat penegakan hukum terkait aturan lalu lintas dan keamanan jalan, Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi keselamatan dan festival aksi keselamatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, berkendara yang bertanggung jawab, dan pemakaian transportasi yang ramah lingkungan yang dapat membantu mengubah perilaku pengguna jalan dan meningkatkan keselamatan serta meningkatkan kinerja lalu lintas.

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1) Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran V/C Rasio di Jalan Provinsi, serta perhitungan tingkat efisiensi

Tabel III. 35 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Desember	% per anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp60.578.250	Rp60.491.624	99,86
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp2.566.993.192	Rp2.542.406.687	99,04
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp57.120.600	Rp49.457.294	86,58
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp39.878.000	Rp39.765.000	99,72
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp107.524.750	Rp107.502.000	99,98
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp61.483.300	Rp52.644.000	85,62
TOTAL	Rp2.893.578.092	Rp2.852.266.605	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,5	0,45	110%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/974/ED/GSB/2023 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2023, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(2.893.578.092 \times 110) - 2.852.266.605}{(2.893.578.092 \times 110)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 0,99$$

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja sasaran V/C Rasio di Jalan Provinsi dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 0,99 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi.

2) Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Berikut ini analisis Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pendukung dari sub kegiatan yang mendukung kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi

Tabel III. 36 Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam rangka pelaksanaan diklat PPNS maka diperlukan SDM dengan jabatan: Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (1 orang), untuk kondisi saat ini kondisi jabatan tersebut sudah diisi oleh 1 orang ASN	Sudah terdapat sarana komputer dan printer yang mendukung kinerja jabatan tersebut		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terkait hal ini dibutuhkan SDM dengan jabatan:			
	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±
	Analisis Lalu Lintas	3	3	0
	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	3	1
	Pengelola Angkutan Kendaraan	2	2	0
	Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	2	1
	Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10
	Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0
Pengatur Lalu Lintas Jalan	2	0	2	
		Untuk sarana pendukung di Bidang LLPK, terdapat 2 mobil operasional untuk membantu pelaksanaan kegiatan		

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana																												
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terkait hal ini dibutuhkan SDM dengan jabatan: <table border="1" data-bbox="562 344 1724 496"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisis Lalu Lintas</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Pengawasan LLAJ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Analisis Lalu Lintas	3	3	0	Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10	Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0	Untuk sarana pendukung di Bidang LLPK, terdapat 2 mobil operasional untuk membantu pelaksanaan kegiatan												
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																														
Analisis Lalu Lintas	3	3	0																														
Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10																														
Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0																														
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																																	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terkait hal ini dibutuhkan SDM dengan jabatan: <table border="1" data-bbox="562 608 1724 759"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Keselamatan Angkutan</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Penyusun Rencana Pengujian</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	1	0	1	Pengawas Keselamatan Angkutan	1	1	0	Penyusun Rencana Pengujian	1	0	1	Untuk sarana pendukung di Bidang LLPK, terdapat 2 mobil operasional untuk membantu pelaksanaan kegiatan												
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																														
Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	1	0	1																														
Pengawas Keselamatan Angkutan	1	1	0																														
Penyusun Rencana Pengujian	1	0	1																														
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terkait hal ini dibutuhkan SDM dengan jabatan: <table border="1" data-bbox="562 799 1724 1059"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Pengawasan LLAJ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksa Lalu Lintas Darat</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Pengawasan LLAJ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengawas Keselamatan Angkutan</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	3	1	Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0	Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	2	1	Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10	Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0	Pengawas Keselamatan Angkutan	1	0	1	Untuk sarana pendukung di Bidang LLPK, terdapat 2 mobil operasional untuk membantu pelaksanaan kegiatan
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																														
Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	3	1																														
Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0																														
Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	2	1																														
Pengawas Keselamatan Darat Atau Jalan	12	2	10																														
Pengelola Pengawasan LLAJ	1	1	0																														
Pengawas Keselamatan Angkutan	1	0	1																														
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN																																	
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi																																	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dalam rangka pengawasan angkutan perkeretaapian dibutuhkan SDM dengan jabatan: <table border="1" data-bbox="562 1182 1724 1334"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Eksisting</th> <th>±</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengawas Perkeretaapian</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Perizinan Perkeretaapian</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	Pengawas Perkeretaapian	1	1	0	Pengelola Perizinan Perkeretaapian	1	1	0	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	0	Untuk kondisi sarana yang mendukung kinerja yaitu terdapat satu mobil operasional untuk Bidang APP di Dinas Perhubungan Provinsi												
Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±																														
Pengawas Perkeretaapian	1	1	0																														
Pengelola Perizinan Perkeretaapian	1	1	0																														
Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	0																														



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia			Sarana dan Prasarana	
	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	1	0	1	Sumatera Barat
	Penyusun Perencanaan Jaringan Perkeretaapian	1	0	1	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi, yaitu terkait keselamatan yang dapat berdampak kepada kinerja lalu lintas di Sumatera Barat:

- a) Adanya kegiatan Pelaksanaan Razia Gabungan dengan instansi terkait dengan pola sidang ditempat (Gapolsipat) serta kegiatan pemeriksaan laik jalan kendaraan (Rampcheck) pada tahun 2023 dengan target pelaksanaan di Kab / Kota Sumatera Barat, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kendaraan - kendaraan yang tidak laik jalan, kendaraan yang tidak memiliki izin, kendaraan yang tidak memiliki surat – surat, serta kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti ODOL (Over Dimensi Over Load), yang mana semua ini dapat mempengaruhi kepada kinerja lalu lintas
- b) Adanya pelaksanaan Rapat Koordinasi FLLAJ Prov. Sumbar dengan semua pihak terkait sebanyak 3 kali, serta adanya tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ dan pengaduan dari masyarakat yang dilakukan, seperti usulan dari Kab / Kota terkait lokasi Pelaksanaan razia, sosialisasi keselamatan, dll
- c) Adanya kegiatan meningkatkan Pemahaman Masyarakat / stakeholder tentang aturan lalu lintas dengan melakukan Sosialisasi keselamatan LLAJ maupun sosialisasi terkait keselamatan perkeretaapian
- d) Melakukan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di UPUBKB kab / Kota Sumatera Barat, sehingga dengan hal ini diharapkan kendaraan yang diperiksa nantinya dapat benar – benar laik jalan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
- e) Adanya kegiatan meningkatkan kualitas petugas Lalu Lintas, yaitu adanya anggaran untuk diklat petugas LLAJ (PPNS) yang bersertifikat pada tahun 2023
- f) Serta adanya upaya dalam rangka pengaturan lalu lintas berupa Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pengawasan Kendaraan Bermotor di Jalan (STPJ), antara lain yaitu:
 - 1) Pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan di terminal
 - 2) Pada kunjungan Pejabat Negara ke Provinsi Sumatera Barat
 - 3) Pada pelaksanaan kegiatan Subuh Mubaroqah yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat

- 
- 4) Pada pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat
 - 5) Pada peringatan hari – hari besar
 - 6) Pada lokasi bencana alam yang menyebabkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas

C.2.2. Perbandingan Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi) dengan Standar Nasional (Kementerian Perhubungan)

Tabel III. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2023			
						Target		Realisasi	
Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Terwujudnya Keselamatan Transportasi IK: Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya keselamatan perhubungan	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	V/C Rasio di jalan Provinsi	20,94	0,50	19,06	0,45

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian.

Dari tabel dapat dilihat untuk Kementerian Perhubungan indikator kinerja sasarannya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan rasio angka kecelakaan adalah indikator kinerja tujuan, dan untuk indikator kinerja sasarannya adalah v/c Rasio, namun antara rasio kecelakaan dengan kinerja lalu lintas mempunyai hubungan yang kompleks, maksudnya dengan melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja lalu lintas, penegakan aturan, dan kesadaran keselamatan yang dapat berkontribusi untuk mengurangi rasio kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat belum selaras sepenuhnya, tetapi masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementerian (Pusat).

C.3 Indikator Kinerja Tujuan (Nilai Akuntabilitas Kinerja)

C.3.1. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi)

Pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, diukur dengan 1 buah indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 38 Target dan realisasi sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,30 BB	66,99 B	92,66 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan renstra 2021 – 2026 target pada tahun 2023 adalah 71,50, namun dikarenakan realisasi pada tahun 2022 sudah melewati target 2023 yaitu sebesar 71,83 sehingga sesuai arahan dari Biro Organisasi target pada tahun 2023 dirubah menjadi 72,30.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 tidak mencapai target yaitu dengan persentase capaian sebesar 92,66% dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

C.3.1.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

1. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi.

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi SAKIP tahun 2023 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2022 dengan nilai adalah B (66,99). Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu BB (72,30), maka dapat diketahui persentase capaian nilai akuntabilitas adalah sebesar 92,66%, ini berarti dalam skala penilaian Sangat Baik.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Nilai Akuntabilitas tahun 2021 – 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel III. 39 Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja		Target			Realisasi		
2021	2022 – 2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,00)	BB (71,00)	BB (72,30)	BB (70,14)	BB (71,83)	B (66,99)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2021 persentase capaian adalah 100,2 %, untuk tahun 2022 adalah 101,16 %, dan untuk tahun 2023 adalah 92,66%.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut ini indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026

Tabel III. 40 Target Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dalam Renstra Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n								
	2021	Realisasi	2022	Realisasi	2023	Realisasi	2024	2025	2026
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB 70,00	BB 70,14	BB 71,00	BB 71,83	BB 71,50	B 66,99	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Dapat dilihat pada tabel diatas, untuk persentase capaian realisasi pada tahun 2023 dengan target akhir renstra (2026) adalah 91,76 %

d) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 41 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	<p>Faktor pendorong yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan 2. Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik 3. Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. 4. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai. 5. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun. 6. Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi) 7. Sudah dilaksanakan sosialisasi dengan narasumber dari BPKP Sumbar 	<p>Terkait komponen penilaian SAKIP yaitu evaluasi internal dan pengukuran kinerja masih memiliki nilai yang kurang, dikarenakan masih kurangnya dokumentasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi internal tersebut</p>	<p>Sudah dibuatkan nota dinas dari Kepala Dinas agar masing – masing bidang melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi secara baik dan berjenjang serta dapat terdokumentasi dengan baik</p>	<p>Upaya perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya dibentuk SK Tim SAKIP di Dinas Perhubungan 2. Melaksanakan sosialisasi SAKIP secara terpisah dengan target yaitu pejabat struktural dan staf agar meningkatkan kesadaran ASN terkait penilaian SAKIP

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1) Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, serta perhitungan tingkat efisiensi

Tabel III. 42 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Desember	% per anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp92.691.159	Rp92.067.105	99,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp157.947.250	Rp156.512.718	99,09
TOTAL	Rp250.638.409	Rp248.579.823	99,18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,3 BB	66,99 B	92,66%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/974/ED/GSB/2023 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2023, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(250.638.409 \times 92,66) - 248.579.823}{(250.638.409 \times 92,66)} \times 100 \%$$

Tingkat efisiensi = 0,98

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 0,98 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah daripada penyerapan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada belum mampu digunakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, hal ini disebabkan dalam penilaian SAKIP Dinas Perhubungan tahun 2023 dimana untuk komponen pengukuran dan evaluasi internal nilainya masih jauh dari bobot yang sudah ditetapkan, sehingga perlunya kesadaran dari unit kerja dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi internal di unit kerja masing – masing.

2) Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Berikut ini analisis Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pendukung dari sub kegiatan yang mendukung kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel III. 43 Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan SDM dengan jabatan:				Untuk sarana terdapat 1 mobil operasional yang mendukung kinerja sekretariat
	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	
	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2	0	2	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan SDM dengan jabatan:				Untuk sarana terdapat 1 mobil operasional yang mendukung kinerja sekretariat
	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	
	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2	0	2	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yaitu dengan adanya kegiatan rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan, serta tindak lanjut yang dilakukan atas permasalahan yang ada

C.4 Indikator Kinerja Tujuan (Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi)

C.4.1. Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi)

Sasaran Strategis 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi" dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

C.4.1.1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Berdasarkan tabel diatas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4, yaitu :

1. Indikator Kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan masyarakat. Tujuan pelaksanaan ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Berikut dasar penilaian kinerja unit pelayanan yang dilakukan:

Tabel III. 44 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber data : PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

METODE PENGHITUNGAN:

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2
- Pilihan D bernilai 1

Contoh Cara Perhitungan

Dari 11 Pertanyaan (untuk responden 1 orang) misalnya:

- 4 Pertanyaan dinilai "A" $\rightarrow 4 \times 4 = 16$
- 3 Pertanyaan dinilai "B" $\rightarrow 3 \times 3 = 9$
- 3 Pertanyaan dinilai "C" $\rightarrow 3 \times 2 = 6$
- 1 Pertanyaan dinilai "D" $\rightarrow 1 \times 1 = 1$

TOTAL 32

Nilai Maksimal 44 (11 pertanyaan x 4)

$$\text{Nilai IKM} = \frac{32}{44} \times 100\% = 72,73 = \text{Mutu Layanan C (Kurang Baik)}$$

Berdasarkan renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 target Indikator Kinerja "Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi" pada tahun 2023 adalah 80%, untuk penetapan target ini dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, dimana terdapat sasaran strategis "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan", dengan indikator kinerja sasaran "Indeks kinerja pelayanan perhubungan", dimana target yang ditetapkan Kementerian Perhubungan adalah 90,1.

Namun untuk sekarang berdasarkan capaian kinerja Kementerian Perhubungan yang terdapat pada situs <http://eperformance.dephub.go.id>, dapat dilihat terjadi perubahan indikator kinerja Kementerian Perhubungan dari indeks kinerja pelayanan perhubungan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan transportasi dengan target tahun 2023 menjadi 88,4.



Untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ruang lingkup pelaksanaan survei ini meliputi pelayanan yang ada di lingkungan Terminal Tipe B (5 Terminal Tipe B), dimana responden yaitu sebanyak \pm 50 orang per terminal, sehingga total menjadi 250 orang responden.

Untuk keterwakilan sampling responden yang kami gunakan mengacu kepada penjelasan Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* (1982) yang dikutip oleh Sugiyono memberikan saran-saran tentang ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.

Terkait penarikan jumlah sampel, maka cara untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian kuantitatif, dapat diperoleh melalui 4 (empat) cara, yaitu:

1. Melalui penghitungan rumus Slovin
2. Melalui Tabel Isaac dan Michael
3. Melalui Tabel Krejcie dan Morgan
4. Melalui Tabel Yount (berdasarkan persentase)

Dari keempat (4) cara tersebut, setiap formula / cara nya mempunyai pendekatan statistik yang berbeda-beda. Akan tetapi keempat (4) formula / cara tersebut dapat digunakan untuk penarikan sampel di dalam dunia penelitian.

Dimana untuk menentukan ukuran besarnya sampel, memang terdapat perbedaan tentang besar sampel penelitian, yang telah dipublikasikan oleh para pakar penelitian. Sebenarnya tidak ada aturan mutlak tentang ukuran besarnya sampel penelitian, yang terpenting bahwa sampel penelitian benar-benar harus representatif.

Kemudian dengan pertimbangan dalam menentukan besarnya sampel yaitu bila populasi homogen, maka dapat menggunakan sampel yang lebih kecil, hal ini sesuai dengan keadaan yang ada pada masing – masing terminal Tipe B, dimana pengguna jasa di Terminal Tipe B untuk populasinya bersifat homogen, sehingga kami menggunakan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:



Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Populasi

e² : persentase kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan.

Sampel yang kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 93%, dan tingkat error (derajat toleransi kesalahan) 7% adalah sebagai berikut:

N = 18.500.000 orang (Target jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2023)

$$e^2 = 7\% = 0,07$$

$$e^2 = 0,07 \text{ dikuadratkan } (0,07 \times 0,07 = 0,0049)$$

$$n = \frac{18.500.000}{1+(18.500.000 \times 0,07^2)}$$

$$n = \frac{18.500.000}{90.651}$$

n = 204, 07 dibulatkan **205** orang / responden

kemudian dikarenakan untuk Terminal Tipe B yang ada sebanyak 5 buah, serta agar jumlah responden sama di tiap – tiap terminal, maka kami menargetkan responden yang sebelumnya 205 orang menjadi 250 orang, atau 50 orang per terminal.

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berikut capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 45 Target dan realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	81,1%	101,37 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi tahun 2023 sebesar 81,1% dengan capaian kinerja 101,37 %.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi Dinas Perhubungan yaitu dengan menggunakan metode Google Form dengan alat bantu kuisioner yang terdiri dari 10 pertanyaan sesuai dengan unsur layanan yang telah di tetapkan, kemudian dengan target 250 responden, realisasinya adalah sebanyak 258 responden.

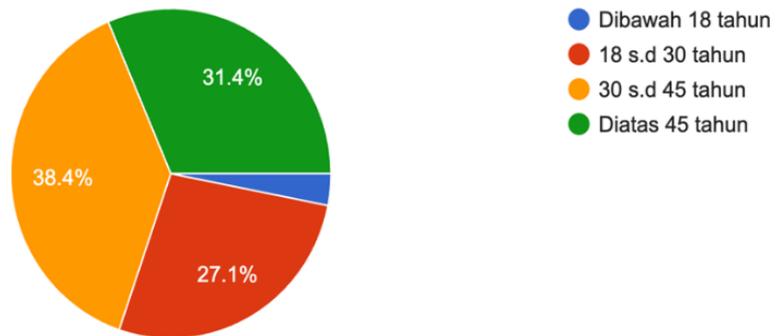
Berikut ini cakupan pertanyaan kuisioner, jawaban, serta perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai:

Profil Responden

Sebelum melakukan survei kepuasan masyarakat akan dilakukan analisis terhadap responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan

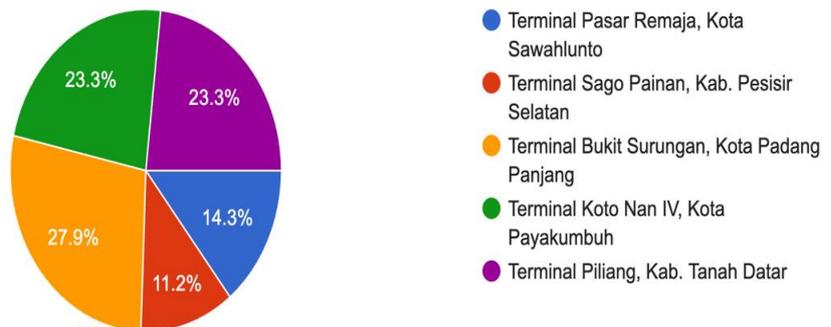
Berapa usia anda ?

258 responses



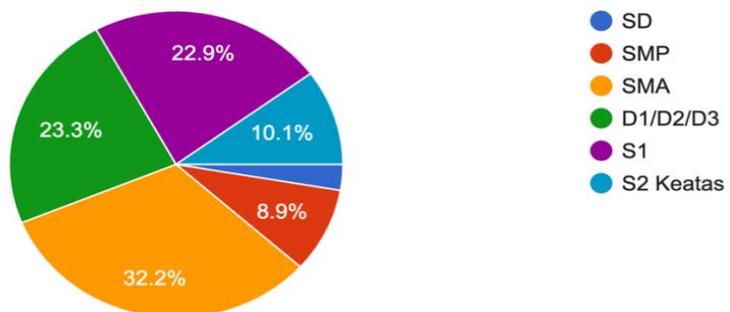
Terminal yang anda kunjungi / yang pernah di kunjungi

258 responses



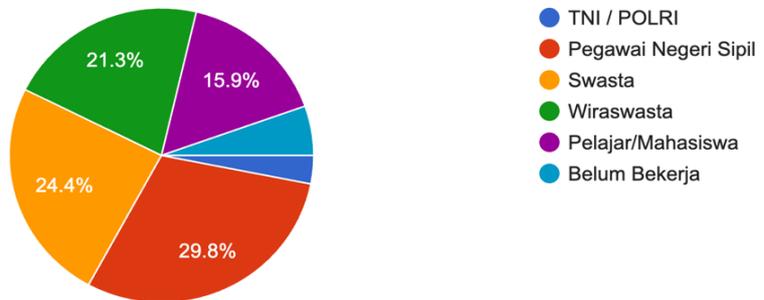
Pendidikan terakhir

258 responses



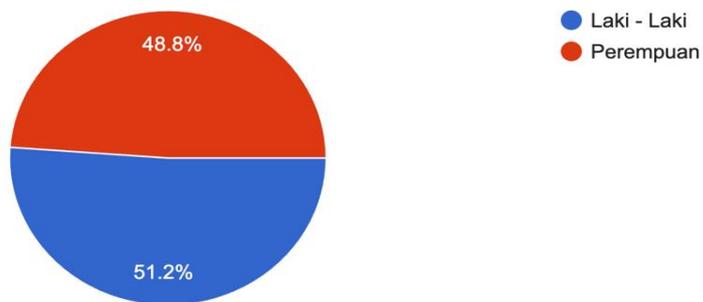
Apa pekerjaan anda

258 responses



Jenis Kelamin

258 responses

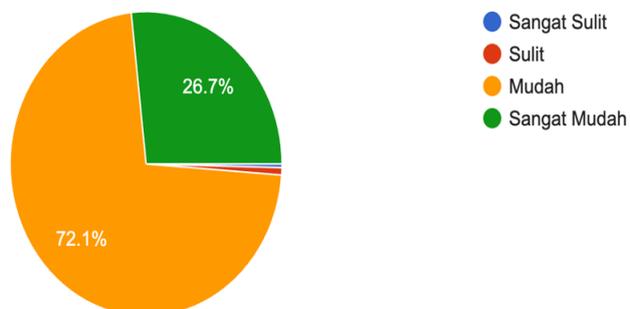


Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pengolahan dan perhitungan data hasil Survei kepuasan Masyarakat menggunakan Google Form dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat saudara tentang prosedur pelayanan dalam pembelian tiket di terminal?

258 responses



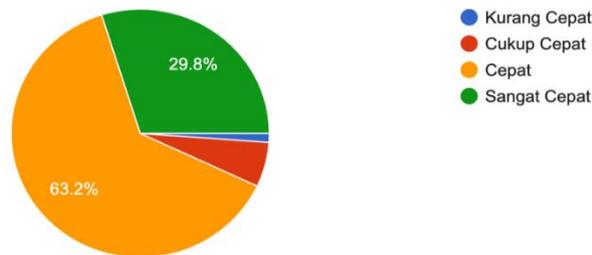
Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

Tabel III. 46 Nilai IKM pertanyaan ke-1

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat Mudah	26,7 %	$26,7 \times 4 = 106,8$
Mudah	72,1 %	$72,1 \times 3 = 216,3$
Sulit	0,8 %	$3,4 \times 2 = 1,6$
Sangat Sulit	0,4 %	$0,4 \times 1 = 0,4$
Total	100%	$=325,1/4 = 81,28$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 81,28 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2. Bagaimana pendapat saudara tentang waktu dalam pemberian layanan oleh petugas di terminal ?
258 responses



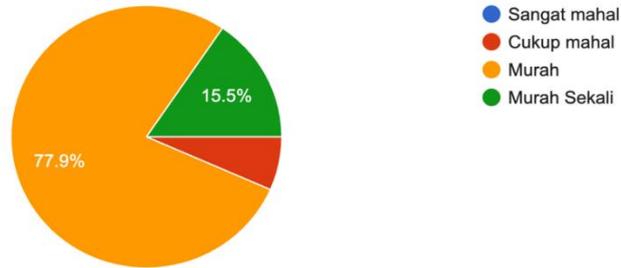
Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

Tabel III. 47 Nilai IKM pertanyaan ke-2

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat Cepat	29,8 %	$29,8 \times 4 = 119,2$
Cepat	63,2 %	$63,2 \times 3 = 189,6$
Cukup Cepat	5,8 %	$5,8 \times 2 = 11,5$
Sangat Cepat	1,2 %	$1,2 \times 1 = 1,2$
Total	100%	$=321,5/4 = 80,36$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 80,36 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

3. Bagaimana pendapat saudara tentang harga tiket angkutan umum di provinsi sumatera barat ?
258 responses



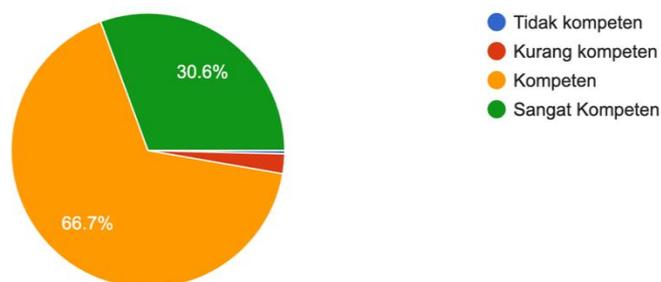
Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

Tabel III. 48 Nilai IKM pertanyaan ke-3

Keterangan	Persentase	Jumlah
Murah Sekali	15,5 %	$15,5 * 4 = 62$
Murah	77,9 %	$77,9 * 3 = 233,7$
Cukup Mahal	6,6 %	$6,6 * 2 = 13,2$
Sangat mahal	0 %	$0,0 * 1 = 0$
Total	100%	$=308,9/4 = 77,23$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 77,23 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

4. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di terminal ?
258 responses



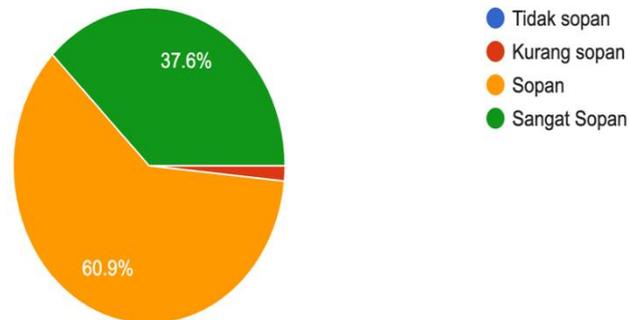
Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

Tabel III. 49 Nilai IKM pertanyaan ke-4

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat Kompeten	30,6 %	$30,6 \times 4 = 122,4$
kompeten	66,7 %	$66,7 \times 3 = 200,1$
Kurang kompeten	2,3 %	$2,3 \times 2 = 4,6$
Tidak Kompeten	0,4 %	$0,4 \times 1 = 0,4$
Total	100%	$=327,5/4 = 81,88$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 81,88 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

5. Bagaimana pendapat saudara terkait perilaku petugas dalam memberikan pelayanan di terminal ?
258 responses



Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

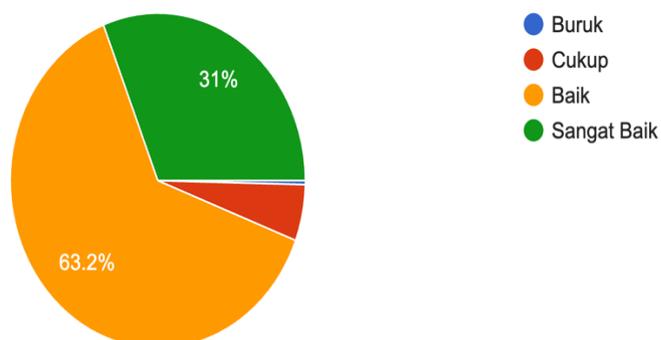
Tabel III. 50 Nilai IKM pertanyaan ke-5

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat Sopan	37,6%	$37,6 \times 4 = 150,4$
Sopan	60,9%	$60,9 \times 3 = 182,7$
Kurang Sopan	1,6 %	$1,6 \times 2 = 3,2$
Tidak Sopan	0,0 %	$0,0 \times 1 = 0$
Total	100%	$=336,3/4 = 84,08$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 84,08 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

6. Bagaimana pendapat saudara tentang kondisi angkutan umum yang saudara gunakan?

258 responses



Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

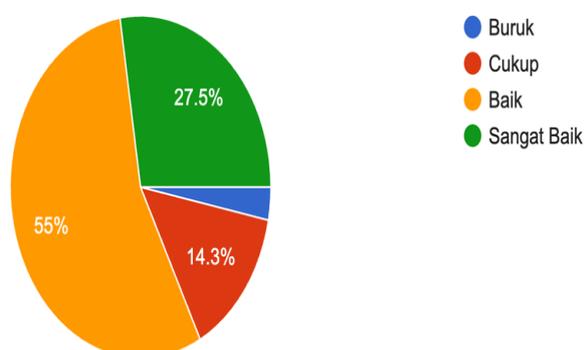
Tabel III. 51 Nilai IKM pertanyaan ke-6

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat baik	31%	$31 \times 4 = 124$
Baik	63,2%	$63,2 \times 3 = 189,6$
Cukup	5,4 %	$5,4 \times 2 = 10,8$
Buruk	0,3 %	$0,3 \times 1 = 0,3$
Total	100%	$= 324,7 / 4 = 81,18$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 81,18 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

7. Bagaimana pendapat saudara tentang kondisi sarana dan prasarana terminal yang anda kunjungi ? (Ruang tunggu, toilet, loket, mushola dan lain-lain)

258 responses



Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

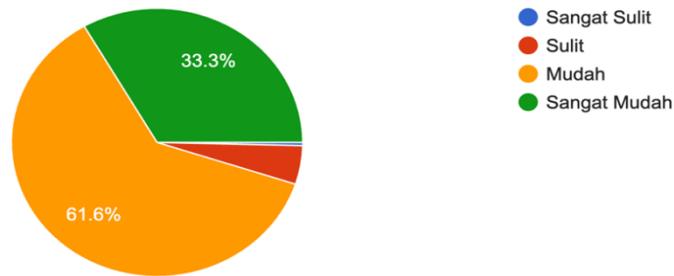
Tabel III. 52 Nilai IKM pertanyaan ke-7

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat Baik	27,5 %	$27,5 \times 4 = 110$
Baik	55%	$55 \times 3 = 165,9$
Cukup	14,3 %	$14,3 \times 2 = 28,6$
buruk	3,2 %	$3,2 \times 1 = 3,2$
Total	100%	$=307,7/4 = 76,93$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 76,93 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

8. Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan dalam mengakses angkutan umum di terminal?

258 responses



Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

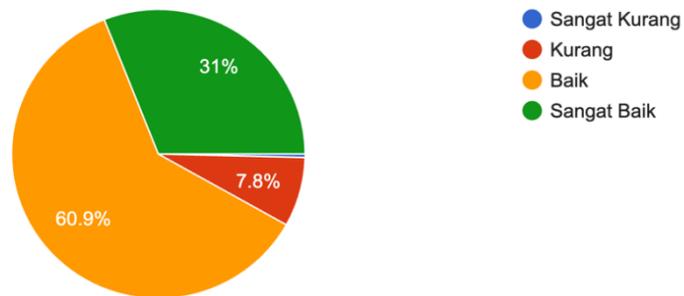
Tabel III. 53 Nilai IKM pertanyaan ke-8

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat mudah	33,3%	$33,3 \times 4 = 133,2$
Mudah	61,6%	$61,6 = 184,8$
Sulit	4,7 %	$4,7 \times 2 = 9,4$
Sangat Sulit	0,4 %	$0,4 \times 1 = 0,4$
Total	100%	$=327,8/4 = 81,95$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 81,95 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

9. Bagaimana pendapat saudara tentang ketersediaan angkutan umum diterminal ?

258 responses



Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

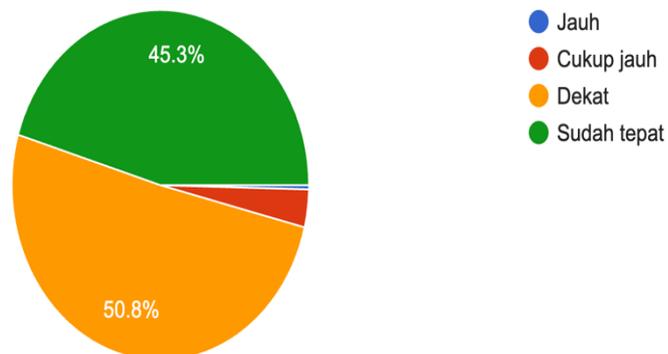
Tabel III. 54 Nilai IKM pertanyaan ke-9

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat Baik	31 %	$31 \times 4 = 124$
Baik	60,9 %	$60,9 \times 3 = 182,7$
Kurang	7,8 %	$7,8 \times 2 = 15,6$
Sangat Kurang	0,4 %	$0,4 \times 1 = 0,4$
Total	100%	$= 322,7 / 4 = 80,68$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 80,68 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

10. Bagaimana pendapat saudara terkait dengan letak lokasi terminal yang anda kunjungi?

258 responses



Perhitungan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut :

Tabel III. 55 Nilai IKM pertanyaan ke-10

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat tepat	45,3 %	$45,3 * 4 = 181,2$
Dekat	50,8 %	$50,8 * 3 = 152,4$
Cukup Jauh	3,5 %	$3,5 * 2 = 7$
Jauh	0,4 %	$0,4 * 1 = 0,4$
Total	100%	$= 341,4 / 4 = 85,25$ Nilai IKM setelah di koversi adalah 85,25 dengan mutu pelayanan kategori B (Baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Secara Keseluruhan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi sebesar **81,1** dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 56 Hasil survei ke masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
U1	81,28	B	Baik
U2	80,36	B	Baik
U3	77,23	B	Baik
U4	81,88	B	Baik
U5	84,08	B	Baik
U6	81,18	B	Baik
U7	76,93	B	Baik
U8	81,95	B	Baik
U9	80,68	B	Baik
U10	85,25	B	Baik
Rata-rata	81,1		

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data diatas dapat dilihat terdapat nilai IKM masing – masing dari 10 pertanyaan yang dilakukan, dan target yang ditetapkan pada renstra Dinas Perhubungan untuk tahun 2023 adalah 80%, sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah 81,1%, sehingga capaian indikator kinerja sasarnya adalah sebesar 101,37%.

Dari hasil survei yang didapat secara umum masyarakat cukup puas dengan pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, hanya ada beberapa saran dari masyarakat yang disampaikan bahwa diharapkan pelayanan selalu humanis dan professional dan khusus untuk UPT Terminal type B Will. I dan Will. II masyarakat mengharapkan adanya perubahan dari aspek sarana dan prasarana terminal mulai dari ruang tunggu, tempat parkir kendaraan dan peralatan yang sudah mendukung teknologi modern serta penambahan petugas teknis.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel III. 57 Tabel Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n			
	2022	Realisasi	2023	Realisasi
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%	79,58%	80%	81,1%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2021 belum terdapat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait pelayanan organisasi, kemudian untuk tahun 2022 capaian kinerja adalah 100,73 % dan untuk tahun 2023 capaian kinerjanya adalah 100,37 %

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berikut tabel indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam Renstra Dinas perhubungan Tahun 2021 – 2026

Tabel III. 58 Target kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n							
	2021	2022	Realisasi	2023	Realisasi	2024	2025	2026
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	78%	79%	79,58%	80%	81,1%	81%	82%	83%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas untuk perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target capaian tahun 2026 (akhir tahun renstra) yaitu 97,71 %

d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 59 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sarpras yang ada di terminal Tipe B 2. Adanya Koordinasi yang baik secara internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan penilaian tingkat kepuasan pelayanan organisasi dapat terlaksana dengan baik 3. Dukungan teknologi sehingga pengambilan hasil dapat dilakukan dengan menarik data dari barcode pengisian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dalam sumber daya organisasi, baik itu dalam hal personel, anggaran, atau infrastruktur, juga dapat membatasi kemampuan organisasi untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan 2. Kurangnya minat atau tingkat ketertarikan masyarakat untuk mengisi kuesioner 3. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk pengembangan sarana prasarana terminal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kepuasan pelayanan organisasi serta efektivitas langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. 2. Melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait barcode survey IKM ini, dan menyebarkan secara aktif di media sosial yang ada 3. Bersurat kepada TAPD untuk mengalokasikan secara terpisah untuk pengembangan sarpras terminal, mengingat terminal merupakan sumber PAD Pemerintah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk rahabilitasi terminal 2. Untuk upaya perbaikan perlu berfokus pada peningkatan kualitas layanan dengan memperbaiki proses, melatih staf, dan menerapkan praktik terbaik dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa di Terminal Tipe B

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

**e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, serta perhitungan tingkat efisiensi

Tabel III. 60 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Desember	% per anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp92.691.159	Rp92.067.105	99,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp157.947.250	Rp156.512.718	99,09
TOTAL	Rp250.638.409	Rp248.579.823	99,18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	81,10%	101,37%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/974/ED/GSB/2023 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2023, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(250.638.409 \times 101,37) - 248.579.823}{(250.638.409 \times 101,37)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 0,99$$

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 0,99, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

2. Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Berikut ini analisis Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pendukung dari sub kegiatan yang mendukung kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 61 Analisis SDM dan Sarpras yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Daya Manusia				Sarana dan Prasarana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan SDM dengan jabatan:				Untuk sarana terdapat 1 mobil operasional yang mendukung kinerja sekretariat
	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	
	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2	0	2	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan SDM dengan jabatan:				Untuk sarana terdapat 1 mobil operasional yang mendukung kinerja sekretariat
	Jabatan	Kebutuhan	Eksisting	±	
	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2	0	2	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yaitu dengan membagikan barcode kuisisioner terkait pelayanan kepada pengguna jasa di lingkungan Terminal Tipe B kewenangan Provinsi.

C.4.2. Perbandingan Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi) dengan Standar Nasional (Kementerian Perhubungan)

Tabel III. 62 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Kementerian Perhubungan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2023			
						Target		Realisasi	
Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub	Kemenhub	Dishub
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani IK: Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	88,4	80	93,82	81,1

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian.

Dari tabel dapat dilihat untuk Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan indikator kinerja sasarannya tercapai, dengan Kementerian Perhubungan capaian kinerjanya 106,13 %, sedangkan untuk Dinas Perhubungan capaian kinerjanya 101,3 %

D. Realisasi Anggaran

Tabel III. 63 Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Belanja	Anggaran total	Realisasi (RP)	Persentase Per Anggaran Total
1	Belanja gaji dan tunjangan	9.442.433.675	9.388.291.205	99,43%
2	Belanja Penunjang Urusan	3.700.414.411	3.647.272.500	98,56%
3	Belanja Urusan	5.234.268.280	5.110.365.271	97,63%
	TOTAL	18.377.116.366	18.145.928.976	98,74%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 64 Realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan Program

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran TA 2023	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.942.548.926	Rp 13.807.803.864	99,03%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 4.125.953.929	Rp 4.056.951.301	98,33%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 199.290.211	Rp 183.394.811	92,02%
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 109.323.300	Rp 97.779.000	89,44%
	TOTAL	Rp18.377.116.366	Rp18.145.928.976	98,74%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Jumlah Trayek yang diakses

Berikut alokasi anggaran dari sub kegiatan terkait kinerja jumlah trayek yang diakses:

Tabel III. 65 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
		Rp	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp 78.880.738	Rp 73.558.213	93,25%	Rp 5.322.525
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 5.025.300	Rp 3.352.000	66,70%	Rp 1.673.300
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Rp 52.082.550	Rp 48.664.760	93,44%	Rp 3.417.790
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Rp 75.374.511	Rp 71.189.497	94,45%	Rp 4.185.014
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Rp 47.840.000	Rp 45.135.000	94,35%	Rp 2.705.000

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2. Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Berikut alokasi anggaran dari sub kegiatan terkait kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Tabel III. 66 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
		Rp	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 15.000.000	Rp 14.914.154	99,43%	Rp 85.846
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp 19.273.600	Rp 11.075.645	57,47%	Rp 8.197.955
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 76.715.240	Rp 59.813.360	77,97%	Rp 16.901.880
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp 829.088.600	Rp 826.074.800	99,64%	Rp 3.013.800
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 170.604.000	Rp 164.932.586	96,68%	Rp 5.671.414
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp 92.904.312	Rp 80.703.601	86,87%	Rp 12.200.711
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 85.452.750	Rp 83.683.053	97,93%	Rp 1.769.697
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp 2.566.993.192	Rp 2.542.406.687	99,04%	Rp 24.586.505
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp 107.524.750	Rp 107.502.000	99,98%	Rp 22.750
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Rp 92.481.687	Rp 85.516.067	92,47%	Rp 6.965.620
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 5.025.300	Rp 3.352.000	66,70%	Rp 1.673.300

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

3. Indikator Kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait V/C Rasio di jalan Provinsi

Tabel III. 67 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
		Rp	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 157.947.250	Rp 156.512.718	99,09%	Rp 1.434.532
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 60.578.250	Rp 60.491.624	99,86%	Rp 86.626
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp 2.566.993.192	Rp 2.542.406.687	99,04%	Rp 24.586.505
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 57.120.600	Rp 49.457.294	86,58%	Rp 7.663.306
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 39.878.000	Rp 39.765.000	99,72%	Rp 113.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp 107.524.750	Rp 107.502.000	99,98%	Rp 22.750
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi				
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp 61.483.300	Rp 52.644.000	85,62%	Rp 8.839.300

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

4. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel III. 68 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
		Rp	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 92.691.159	Rp 92.067.105	99,33%	Rp 624.054
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 157.947.250	Rp 156.512.718	99,09%	Rp 1.434.532

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

5. Indikator Kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 69 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
		Rp	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 92.691.159	Rp 92.067.105	99,33%	Rp 624.054
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 157.947.250	Rp 156.512.718	99,09%	Rp 1.434.532

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 70 Realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2023:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Rp	%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rp 18.377.116.366	99,82	Rp 18.145.928.976	98,74%	Rp 231.187.390
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 13.942.548.926	100,00	Rp 13.807.803.864	99,03%	Rp 134.745.062
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 250.638.409	100,00	Rp 248.579.823	99,18%	Rp 2.058.586
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 92.691.159	100,00	Rp 92.067.105	99,33%	Rp 624.054
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 157.947.250	100,00	Rp 156.512.718	99,09%	Rp 1.434.532
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.660.919.125	100,00	Rp 9.604.911.798	99,42%	Rp 56.007.327
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.442.433.675	100,00	Rp 9.388.291.205	99,43%	Rp 54.142.470
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 161.426.000	100,00	Rp 161.255.000	99,89%	Rp 171.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 57.059.450	100,00	Rp 55.365.593	97,03%	Rp 1.693.857
3)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 97.663.550	100,00	Rp 94.089.942	96,34%	Rp 3.573.608
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 61.022.300	100,00	Rp 59.181.008	96,98%	Rp 1.841.292
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 36.641.250	100,00	Rp 34.908.934	95,27%	Rp 1.732.316
4)	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 110.988.840	77,39	Rp 85.803.159	77,31%	Rp 25.185.681

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Rp	%	
8	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 15.000.000	100,00	Rp 14.914.154	99,43%	Rp 85.846
9	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp 19.273.600	57,47	Rp 11.075.645	57,47%	Rp 8.197.955
10	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 76.715.240	77,97	Rp 59.813.360	77,97%	Rp 16.901.880
5)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 127.626.250	98,08	Rp 121.922.473	95,53%	Rp 5.703.777
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 60.578.250	100,00	Rp 60.491.624	99,86%	Rp 86.626
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 45.197.500	100,00	Rp 42.032.951	93,00%	Rp 3.164.549
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 21.850.500	88,78	Rp 19.397.898	88,78%	Rp 2.452.602
6)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.364.484.239	99,80	Rp 1.356.182.297	99,39%	Rp 8.301.942
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 30.514.000	100,00	Rp 30.456.085	99,81%	Rp 57.915
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 23.238.800	88,34	Rp 20.528.500	88,34%	Rp 2.710.300
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 76.257.300	100,00	Rp 74.834.600	98,13%	Rp 1.422.700
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19.498.500	100,00	Rp 19.416.250	99,58%	Rp 82.250
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 20.325.000	100,00	Rp 20.280.000	99,78%	Rp 45.000
19	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 688.712.000	100,00	Rp 686.437.000	99,67%	Rp

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Rp	%	
						2.275.000
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 505.938.639	100,00	Rp 504.229.862	99,66%	Rp 1.708.777
7)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.096.060.368	99,88	Rp 2.072.742.358	98,89%	Rp 23.318.010
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 15.436.000	86,60	Rp 13.367.357	86,60%	Rp 2.068.643
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 275.108.900	100,00	Rp 256.572.972	93,26%	Rp 18.535.928
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.805.515.468	99,98	Rp 1.802.802.029	99,85%	Rp 2.713.439
8)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 234.168.145	100,00	Rp 223.572.014	95,47%	Rp 10.596.131
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 26.514.000	100,00	Rp 26.374.622	99,47%	Rp 139.378
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 118.116.145	100,00	Rp 109.828.892	92,98%	Rp 8.287.253
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 34.920.000	100,00	Rp 32.856.500	94,09%	Rp 2.063.500
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 54.618.000	100,00	Rp 54.512.000	99,81%	Rp 106.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 4.125.953.929	100,00	Rp 4.056.951.301	98,33%	Rp 69.002.628
9)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp 999.692.600	100,00	Rp 991.007.386	99,13%	Rp 8.685.214
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp 829.088.600	100,00	Rp 826.074.800	99,64%	Rp

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Rp	%	
						3.013.800
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 170.604.000	100,00	Rp 164.932.586	96,68%	Rp 5.671.414
10)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rp 178.357.062	100,00	Rp 164.386.654	92,17%	Rp 13.970.408
30	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp 92.904.312	100,00	Rp 80.703.601	86,87%	Rp 12.200.711
31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 85.452.750	100,00	Rp 83.683.053	97,93%	Rp 1.769.697
11)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 2.624.113.792	100,00	Rp 2.591.863.981	98,77%	Rp 32.249.811
32	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp 2.566.993.192	100,00	Rp 2.542.406.687	99,04%	Rp 24.586.505
33	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 57.120.600	100,00	Rp 49.457.294	86,58%	Rp 7.663.306
12)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 147.402.750	100,00	Rp 147.267.000	99,91%	Rp 135.750
34	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 39.878.000	100,00	Rp 39.765.000	99,72%	Rp 113.000
35	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp 107.524.750	100,00	Rp 107.502.000	99,98%	Rp 22.750
13)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 78.880.738	100,00	Rp 73.558.213	93,25%	Rp 5.322.525
36	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp 78.880.738	100,00	Rp 73.558.213	93,25%	Rp 5.322.525

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Rp	%	
14)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 92.481.687	100,00	Rp 85.516.067	92,47%	Rp 6.965.620
37	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Rp 92.481.687	100,00	Rp 85.516.067	92,47%	Rp 6.965.620
15)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 5.025.300	100,00	Rp 3.352.000	66,70%	Rp 1.673.300
38	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 5.025.300	100,00	Rp 3.352.000	66,70%	Rp 1.673.300
C	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 199.290.211	100,00	Rp 183.394.811	92,02%	Rp 15.895.400
16)	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Rp 52.082.550	100,00	Rp 48.664.760	93,44%	Rp 3.417.790
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Rp 52.082.550	100,00	Rp 48.664.760	93,44%	Rp 3.417.790
17)	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah	Rp 75.374.511	100,00	Rp 71.189.497	94,45%	Rp 4.185.014

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Rp	%	
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
40	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Rp 75.374.511	100,00	Rp 71.189.497	94,45%	Rp 4.185.014
18)	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp 71.833.150	100,00	Rp 63.540.554	88,46%	Rp 8.292.596
41	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp 71.833.150	100,00	Rp 63.540.554	88,46%	Rp 8.292.596
D	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rp 109.323.300	100,00	Rp 97.779.000	89,44%	Rp 11.544.300
19)	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 47.840.000	100,00	Rp 45.135.000	94,35%	Rp 2.705.000
42	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi	Rp 47.840.000	100,00	Rp 45.135.000	94,35%	Rp 2.705.000
20)	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Rp 61.483.300	100,00	Rp 52.644.000	85,62%	Rp 8.839.300
43	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp 61.483.300	100,00	Rp 52.644.000	85,62%	Rp 8.839.300

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 10 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 %, penyebabnya antara lain sisa anggaran dari rincian belanja sub kegiatan yang tidak terealisasi serta efisiensi anggaran. Sementara sisa kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan.



Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan kinerja Dinas Perhubungan, untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan kinerja pada tahun 2023 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 101,24 %, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat disimpulkan dari 4 (empat) indikator kinerja Tujuan Dinas Perhubungan, terdapat 2 (dua) indikator tujuan yang tidak tercapai, yaitu rasio konektivitas dan nilai akuntabilitas kinerja. Sedangkan di tingkat sasaran seluruh indikator kinerja sasaran telah tercapai kecuali Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Berikut ini tabel capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

Tabel IV. 1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	0,676	0,670	99,11 % (Sangat baik)	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 % (Sangat baik)
							Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	18.500. 000 orang	18.906.971 orang	102,19 % (Sangat baik)
2.	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	9,26	8,34	110 % (Sangat baik)	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,50	0,45	110 % (Sangat baik)
3.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72,30 BB	66,99 B	92,66 % (Sangat baik)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,30 BB	66,99 B	92,66 % (Sangat baik)
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80%	81,1%	101,37 % (Sangat baik)	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	81,1%	101,37 % (Sangat baik)
		Rata – rata capaian indikator kinerja tujuan			100,78 % (Sangat baik)		Rata – rata capaian indikator kinerja sasaran			101,24 (Sangat baik)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Esselon II

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN Jl. Jaka R. Soeparto No.1 No. 12 Telp/WA 08117538111 http://dinkabuk.sumbarprov.go.id PADANG</p>
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
<p>Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama	: DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
<p>Selanjutnya disebut pihak pertama</p>	
Nama	: MAHYELDI
Jabatan	: Gubernur Sumatera Barat.
<p>Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p>Padang, Maret 2023</p>	
<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>MAHYELDI</p>	<p>PIHAK PERTAMA,</p>  <p>DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM NIP. 19721222 199403 1 002</p>

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,30 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.389.554.955	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.256.310.225	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	246.290.211	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	151.422.500	APBD
JUMLAH		7.043.577.891	APBD

Padang, Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



DEDY DIANTOLANI, S.Sos., MM
NIP. 19721222 199403 1 002

Perjanjian Kinerja Perubahan Esselon II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa R. Soegarto No.1 No. 12 Telp/WA :08117538111

<http://dislub.sumbarprov.go.id>

PADANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2023

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM
NIP. 19721222 199403 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	18.500.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,30 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.500.115.251	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.125.953.929	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	199.290.211	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	109.323.300	APBD
JUMLAH		8.934.682.691	APBD

Padang, November 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



DEDY DIANTOLANI, S.Sos., MM
NIP. 19721222 199403 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3506202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : tu@ddat.kemhub.go.id
Home Page : www.kemhub.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP-DRJD 9496 Tahun 2022**

TENTANG

**PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pengembangan jaringan angkutan penyeberangan melalui sabuk nasional untuk menunjang pengembangan ekonomi masyarakat serta penyediaan pelayanan angkutan penyeberangan di daerah tertinggal dan/atau wilayah terpencil, perlu diselenggarakan angkutan penyeberangan perintis;
 - bahwa berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779), telah diatur bahwa dalam rangka menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil serta menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, diselenggarakan kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dengan penetapan lintas oleh Direktur Jenderal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PERHUBUNGAN DARAT
 NOMOR KP-DRJD 9496 Tahun 2022
 TENTANG
 PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS
 TAHUN ANGGARAN 2023

LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROVINSI	NAMA LINTAS	JARAK (mil)
1	2	3	4
1	Aceh	1 Singkil - Pulau Banyak 2 Ulee Lheu - Lamteng 3 Ulee Lheu - Serangung	28 12 16
2	Aceh - Sumatera Utara	4 Singkil - Gunung Sitoli	72
3	Sumatera Utara	5 Teluk Dalam - Pulau Tello 6 Balige - Onan rungu 7 Muara - Onan rungu 8 Baktiraja - Muara 9 Tongging - Silalahi	49 13,5 8,2 6 6,2
4	Sumatera Barat	10 Padang - Siberut 11 Siberut - Tuspejat 12 Tuspejat - Sikakap 13 Padang - Sikabuluan	82 62 74,6 90
5	Kepulauan Riau	14 Tanjung Pinang - Tanjung Halai Karimun 15 Tanjung Pinang - Dabo 16 Dabo - Penarik 17 Tanjung Uban - Matak 18 Matak - Midai 19 Midai - Natuna (Penagi) 20 Natuna (Penagi) - Subi 21 Subi - Serasan 22 Tanjung Uban - Tambelan	107 88 9 193 98 82 67 51 220
6	Kepulauan Riau - Kalimantan Barat	23 Tambelan - Sintete 24 Serasan - Sintete	97 88
7	Riau	25 Sei Selari - Kampung Balak 26 Kampung Balak - Alai Insit 27 Alai Insit - Pecah Buyung 28 Alai Insit - Dumai	43 14 1,5 107
8	Bangka Belitung	29 Tanjung Ru- Tanjung Nyato	5
9	Bengkulu	30 Bengkulu - Enggano	106
10	Jawa Timur	31 Jangkar - Pulau Sapudi 32 Pulau Sapudi - Kalianget 33 Raas - Kalianget 34 Jangkar - Kalianget 35 Kalianget - Masalembu 36 Bawean - Gersik	38 25 50 45 142 80
11	Jawa Timur - Sulawesi Selatan	37 Paciran - Garongkong	470
12	Jawa Timur-Kalimantan Tengah	38 Paciran - Bahaur	253
13	Kalimantan Barat	39 Rasau Jaya - Pinang Luar 40 Parit Sarem - Sungai Nipah 41 Kuala Buayan - Sungai Delan 42 Ceremai - Sumpit 43 Sei Asam - Sunyat 44 Teluk Malike - Jangkang Dua 45 Sumber Agung - Seponti Jaya	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1
14	Kalimantan Utara	46 Tarakan - Nunukan 47 Nunukan - Sebatik	101 3



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505589, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : KP-DJKA 69 TAHUN 2023

T E N T A N G

**GRAFIK PERJALANAN KERETA API
PADA JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI
SUMATERA BAGIAN BARAT TAHUN 2023**

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa, perlu menetapkan grafik perjalanan kereta api pada jaringan jalur kereta api nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2023;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebutuhan angkutan, perubahan kondisi prasarana, dan peningkatan kecepatan kereta api, perlu untuk menyesuaikan jadwal dan frekuensi perjalanan kereta api pada jaringan jalur kereta api nasional di Sumatera Bagian Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Barat Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

**REKAPITULASI JENIS PELAYANAN, KELAS KA & KM KA SUMATERA BARAT
GAPEKA 2023**

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS KA	JUMLAH KA			JUMLAH KM KA
			REG	FAK	JUMLAH KA	
1	EKONOMI	Ekonomi	8	1	9	599
		Bandara	12	0	12	306
		KRD Ekonomi	6	0	6	228
		Wisata	0	2	2	8
		<i>Jumlah Ekonomi</i>	26	3	29	<i>1.140</i>
2	BARANG	Semen Klinker	24	10	34	496
		CPO	0	2	2	131
		<i>Jumlah Ekonomi</i>	24	12	36	<i>1.776</i>
3	DINAS	Dinas Rangkaian Divre II Sumbar	2	0	2	5
		Dinas Lokomotif Divre II Sumbar	2	2	4	39
		<i>Jumlah Ekonomi</i>	4	2	6	45
		<i>JUMLAH DIVRE II SUMBAR</i>	54	17	71	<i>2.961</i>



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT, NO.8
JAKARTA, 10110

Telp. (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3962178
email : ditjenhub.d@kptbhub.go.id
Home Page : <http://ditjenhub.d.kptbhub.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP – DRJD 8613 TAHUN 2022**

TENTANG

**JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Perintis Angkutan Jalan, telah diatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP – DRJD 8613 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
JALAN PERINTIS TAHUN 2023

**JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2023**

PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
2	3		5
ACEH	1	Meulaboh - Alue Peunyarang	35
	2	Kota Kuala Simpang - Kota Selamat	78
	3	Sinabang - Sibigo	188
	4	Sinabang - Alafan	278
	5	Simpang Empat Kota Fajar - Mangamat	50
	6	Kuala Simpang - Tenggulun	86
	7	Gunung Meriah - Singkil	45
SUMATERA UTARA	8	Pematang Raya - Nagari Dolok	26
	9	Pematang Raya - Raya Bosi	23
	10	Pematang Raya - Bah Bolon	32
	11	Besitang - Tani Jaya - Pangkalan Berandan	36,5
	12	Sihosar (Merek) - Kabanjahe	25
	13	Pantai Buaya - Pangkalan Berandan	30
	14	Gunung Sitoli - Teluk Dalam	120
SUMATERA BARAT	15	Pulau Pujung - Sei Rumbai - Sitiung III	41
	16	Pulau Pujung - Sikabau - Simp.3 Koto Baru - Ampalu	40
	17	Padang Aro - Uluh Suliti	62
	18	Tuapejat - Sioban (Kab. Kepulauan Mentawai)	45
	19	Pariaman - Urek Kaji - P.Kambar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	24

Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Nama Penghargaan : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemenang dalam kategori Pemerintah Daerah dengan Data Dukung usulan trayek terbaik dalam perintis award 2023

Pemberi Penghargaan : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Capt. Hendri Ginting)

Penerima Penghargaan : Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Syamsuriani, SH, MM)

Tempat dan Tanggal : Alana Hotel, Jogjakarta, 1 Agustus 2023

Penerimaan Penghargaan



Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2023

- Nama Penghargaan : Suksesnya pengaturan lalu lintas arus mudik dan arus balik lebaran idul fitri 1444 H / 2023 M di Provinsi Sumatera Barat
- Pemberi Penghargaan : Gubernur Sumatera Barat
- Penerima Penghargaan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

